



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)  
TAHUN 2023**

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

*programdistankp@gmail.com*



## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

Wassalam.

Benteng, 16 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan Kabupaten  
Kepulauan Selayar,



**ANDI KRISNAYANTI, S.Sos.**

Pangkat : Pembina, IV/A

NIP. 196809181993032005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing misi berdasarkan capaian pada tahun 2023 dan capaian berdasarkan target Renstra tahun 2023 sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ditetapkan 2 sasaran dengan 5 indikator sasaran dan mengacu pada 2 misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

### Pencapaian target Misi Renstra Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023			
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA/ KODE
1.	Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian	Kontribusi sector tanaman pangan/ palawija terhadap PDRB	%	2,64)*	3,09	2.50)**	80.98	Tinggi
		Kontribusi sector hortikultura terhadap PDRB	%	0,95)*	1,04	0.94)**	89.98	Tinggi
		Kontribusi sector perkebunan terhadap PDRB	%	11,53)*	11,54	12.18)**	105.59	Sangat Baik
		Kontribusi sector peternakan terhadap PDRB	%	1,11)*	1,17	1.09)**	92.78	Sangat Baik
2.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		76,9	79,90	81,4	101,88	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	nilai	64,30	65	61,01)*	93,86	Sangat Baik
		Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan		Sesuai	Sesuai	Sesuai)*	100	Sangat Baik
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	75,6	75,50	78,8	104,37	Sangat Baik

)\* = angka sementara                   )\*\* = angka sangat sementara

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.16.389.102.176,- (enam belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan realisasi sebesar Rp.14.941.201.728,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 91,17%. Sisa anggaran sebesar Rp.1.447.900.448,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 91,17 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	2
D. Isu-Isu Strategis .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	15
B. Indikator Kinerja Utama .....	23
C. Rencana Kinerja Tahunan .....	26
D. Perjanjian Kinerja .....	32
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengukuran Kinerja .....	34
B. Analisis Capaian Kinerja .....	36
C. Realisasi Keuangan .....	100
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Keadaan Aparatus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 ..... 6
Tabel 2.	Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 ..... 6
Tabel 3	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar ..... 20
Tabel 4	Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran Dan Kriteria Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar ..... 24
Tabel 5	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ..... 26
Tabel 6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ..... 27
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ..... 32
Tabel 8	Skala Nilai Peringkat Kinerja ..... 35
Tabel 9	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ..... 37
Tabel 10	Persentase PDRB Sektor pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2023 ..... 38
Tabel 11	Situasi Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Konsumsi Energi dan Protein serta Besarnya Skor PPH Tahun 2023 41

Tabel 12	Capaian Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2023 .....	42
Tabel 13	Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas Padi 2016-2023.....	46
Tabel 14	Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas Jagung 2016-2023 .....	48
Tabel 15	Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas Jeruk Keprok 2016-2023.....	51
Tabel 16	Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas Perkebunan (Kelapa, Pala, Cengkeh, Jambu Mete) 2016-2023 .....	54
Tabel 17	Perbandingan Capaian Populasi Ternak (ekor) 2016-2023 .....	58
Tabel 18	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	72
Tabel 19	Realisasi Capaian Keuangan TA. 2023.....	101
Tabel 20	Pagu Anggaran Pokok dan Anggaran Perubahan Serta Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 .....	102

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	3
Grafik 1 Perbandingan Perkembangan produksi, produktivitas dan luas panen padi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2023 .....	47
Grafik 2 Perbandingan Perkembangan produksi, produktivitas dan luas panen jagung di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2023 .....	49
Grafik 3 Perbandingan Perkembangan produksi dan produktivitas Jeruk Keprok di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2023 .....	52
Grafik 4 Perbandingan Perkembangan Produksi Perkebunan (Kelapa, Cengkeh, Jambu Mete) di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2023 .....	55
Grafik 5 Perbandingan Perkembangan Produktivitas Perkebunan (Kelapa, Cengkeh, Jambu Mete) di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2023 .....	55
Grafik 6 Perbandingan Populasi Ternak di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2023 .....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pohon Kinerja/Cascading Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## **C. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

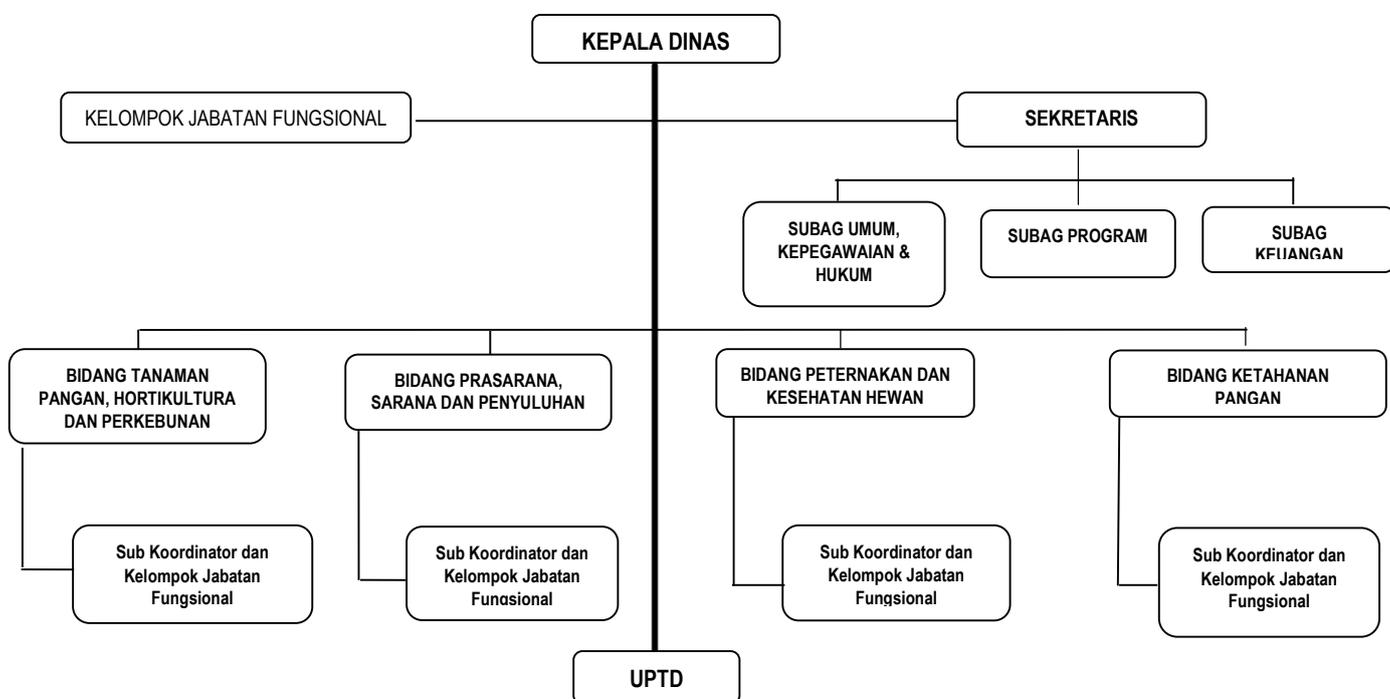
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113). Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan, adalah tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beralamat di Jl. DR. Sam Ratulangi No. 17 Benteng, Kode Pos 92812. *E-mail* [programdistankp@gmail.com](mailto:programdistankp@gmail.com).

### 1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 688).

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021)



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil serta pemberian izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok Kepala Dinas meliputi:

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
7. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
8. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
9. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
10. melaksanakan administrasi Dinas;
11. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung internal keberhasilan dalam pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan per 31 Desember 2023 adalah 125 (seratus dua puluh lima) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2023

No	Struktur Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II	0	1	1 orang
2.	Eselon III A	1	-	1 orang
3.	Eselon III B	3	1	4 orang
4.	Eselon IV A	-	5	5 orang
5.	Eselon IV B	-	1	1 orang
6.	Non Eselon	10	13	23 orang
7.	Fungsional	40	40	80 orang
8.	PPPK (Non Eselon)	5	5	10 orang
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>	<b>66</b>	<b>125 orang</b>

## 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Posisi per 31 Desember 2023, sarana dan prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan meliputi :

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1.	Tanah	745.015 M <sup>2</sup>	-
2.	Peralatan dan Mesin	1.044 unit	Layak
3.	Gedung dan Bangunan	81 unit	Layak
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	643 unit	Layak
5.	Aset tetap lainnya	6 unit	Layak

#### **D. Isu - Isu Strategis**

Adapun isu strategis dalam menjalankan agenda pembangunan pada Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

##### **1. Produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.**

Produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diproduksi oleh petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas pertanian strategis, mencakup kegiatan pertanian secara terpadu mulai dari pengolahan, penanganan dan pemasaran hasil pertanian.

Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

##### **2. Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan**

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celsius, sehingga diprediksi

akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun.

Di sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosif hama dan penyakit tanaman, serta pada akhirnya terjadi penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

### **3. Ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian**

#### **a. Jaringan Irigasi**

Kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan dam parit serta pemanfaatan sumber air tanah dan air hujan.

b. Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi)

Jalan usaha tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan.

c. Prasarana usahatani

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara untuk komoditi hortikultura, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan *greenhouse* untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani tersebut dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau.

d. Sarana produksi

Permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/ bibit secara luas hingga di sentra produksi.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

#### **4. Alih fungsi lahan serta status dan luas kepemilikan lahan**

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah

bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; regulasi atau peraturan; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

#### **5. Akses petani terhadap permodalan**

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan.

#### **6. Kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh pertanian**

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dihadapkan pada tantangan ke

depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di perdesaan.

#### **7. Kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian dalam menunjang pembangunan pertanian**

Sumber daya manusia aparat pertanian masih kurang memuaskan. Diperlukan pembenahan internal agar aparat mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan efektif. Pembenahan mencakup upaya-upaya pergeseran sikap dan wawasan serta kompetensi aparat agar menjadi aparat yang profesional, hingga upaya penataan kelembagaan agar mampu menjawab tuntutan zaman yang terus berubah. Pembangunan sektor pertanian dan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Koordinasi antar sektor perlu lebih ditingkatkan.

#### **8. Nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di pasar global**

Karakteristik pertanian adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang rendah dan beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. Diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antar daerah) maupun kerjasama regional (antar negara).

## **9. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal**

Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan. Diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal dapat dilakukan, namun pangan lokal masih belum mengalami banyak perkembangan. Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah: (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal.

## **10. Pengembangan distribusi, stabilitas harga dan akses pangan**

Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.

Isu stabilitas harga pangan penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen. Selain itu, harga pangan di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia.

Disamping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah

#### **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Indikator capaian pada akhir periode tahun 2026 dengan visi Bandar Maritim adalah :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Visi Bandar Maritim ditopang oleh program prioritas pembangunan yaitu tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng; (b). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea; (d). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang; (b). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya; (c). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang; (d). Sub Kawasan 4 pada

Kawasan Pantai Bahuluang; (e). Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi; (f). Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi; dan (g). Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu : (a). Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang; (b). Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea; (d). Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2021-2026 adalah:

- a. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
- b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
- c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
- d. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.
- e. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
- f. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keterkaitan antara visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditunjukkan pada pokok visi “*Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia*” dengan Misi ke-1 yaitu “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”; Misi ke-2 yaitu “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan; dan Misi ke-3 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat”.

Maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merefleksikan konteks tujuan pembangunan yang dihadapi dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan selama 5 (lima) tahun yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan petani;
2. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian;
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu;
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah.

Dalam mendukung Misi kesatu yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menetapkan tujuan yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sasaran dalam mencapai target RPJMD 2021-2026 adalah Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah.

Sesuai dengan Misi kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2021-2026 adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan daya saing pertanian melalui pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Untuk mencapai Misi ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2021-2026 adalah meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Sedangkan sasaran 2021-2026 adalah meningkatnya ketahanan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 (lima) tahun diuraikan pada tabel berikut (T-C.25) :

Tabel 3. Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun					Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan kesejahteraan petani		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	16,03	16,84	17,17	17,39	17,63	17,63
		Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian	Kontribusi Sektor tanaman pangan/palawija terhadap PDRB	2,94	3,09	3,28	3,37	3,47	3,47
			Kontribusi Sektor hortikultura terhadap PDRB	0,99	1,04	1,05	1,06	1,07	1,07
			Kontribusi Sektor perkebunan terhadap PDRB	10,99	11,54	11,66	11,77	11,89	11,89
			Kontribusi Sektor peternakan terhadap PDRB	1,11	1,17	1,18	1,19	1,20	1,20

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun					Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat		Indeks Ketahanan Pangan	75,26	75,50	75,75	76,00	76,25	76,25
		Meningkatnya ketahanan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,87	79,90	79,93	79,97	80	80
3.	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah		Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	72	75	80	82	85	90
		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	60 (B)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	80 (A)	80 (A)
			Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			Indeks kepuasan masyarakat	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	77,00

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun					Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			terhadap pelayanan perangkat daerah						

*Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
- Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.
- Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021 setelah revidi, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. INSTANSI : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia
3. MISI : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
4. TUJUAN :
  1. Meningkatkan kesejahteraan petani
  2. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
5. TUGAS DAN FUNGSI :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Tabel 4. Target Indikator Kinerja (IKS/IKU)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA 2020	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya ketahanan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	Kontribusi Sektor tanaman pangan/ palawija terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi tanaman pangan}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/ perkebunan}} \times 100\%$	%	2,94	3,09	3,28	3,37	3,47	3,60	3,60

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA 2020	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kontribusi Sektor hortikultura terhadap PDRB	Jumlah kontribusi Hortikultura _____ x 100% Jumlah PDRB sektor pertanian/ perkebunan	%	0,99	0,99	1,04	1,05	1,06	1,07	1,09
		Kontribusi Sektor perkebunan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi perkebunan _____ x 100% Jumlah PDRB sektor pertanian/ perkebunan	%	10,99	10,99	11,54	11,66	11,77	11,89	11,89
		Kontribusi Sektor peternakan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi peternakan _____ x 100% Jumlah PDRB sektor pertanian/ perkebunan	%	1,11	1,17	1,18	1,19	1,20	1,22	1,22
2.	Meningkatnya ketahanan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Presentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dikali bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan	%	79,8	79,87	79,90	79,93	79,97	80	80

### C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Secara rinci, berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kesejahteraan petani		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	16,84
		Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian	Kontribusi Sektor tanaman pangan/palawija terhadap PDRB	3,09
			Kontribusi Sektor hortikultura terhadap PDRB	1,04
			Kontribusi Sektor perkebunan terhadap PDRB	11,54
			Kontribusi Sektor peternakan terhadap PDRB	1,17
2.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat		Indeks Ketahanan Pangan	75,50
		Meningkatnya ketahanan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,90

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5
3.	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah		Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	75
		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	65 (B)
			Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	75,50

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian khususnya Tahun 2023 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan program dan kegiatan, yaitu :

Tabel 6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
				Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan

<b>No</b>	<b>Urusan Pemerintahan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
			Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2.		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
3.		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kabupaten/ Kota	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan kabupaten/ kota
4.	Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

No	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyesiaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman
			Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/ Kota Lain
6.		Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembanguna Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

No	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan DAM Parit
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
7.		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
			Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
8.		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
9.		Program Penyuluhan Pertanian	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

#### D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Bupati Kepulauan Selayar dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET TAHUNAN</b>
1.	Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian	Kontribusi sector tanaman pangan/ palawija terhadap PDRB	%	3,09
		Kontribusi sector hortikultura terhadap PDRB	%	1,04
		Kontribusi sector perkebunan terhadap PDRB	%	11,54
		Kontribusi sector peternakan terhadap PDRB	%	1,17
2.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		79,90
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sakip perangkat daerah		65 (B)
		Laporan Keuangan OPD sesuai SAP		Sesuai
		Indeks kepuasan layanan Non SPM		75,50

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp. 55.223.500,-
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan Rp. 7.635.000,-
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan Rp. 6.762.000,-
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Rp. 11.843.462.576,-
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp. 1.956.515.800,-
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rp.1.969.037.000,-
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Rp. 304.967.500,-
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Rp. 20.431.200,-
9. Program Penyuluhan Pertanian Rp. 225.067.600,-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Bapak Bupati Kepulauan Selayar tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91% ≤ 100%	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau Muda
3.	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning Tua
4.	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 diukur untuk mengetahui keberhasilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2023. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Ketentuan penetapan Indeks Capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120
2. Angka minimum adalah 0

Penetapan ini dimaksudkan untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat.

## **B. Analisis Capaian Kinerja**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 188.43/05/I/TAHUN 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Renstra Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 9.

## Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023			
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA/ KODE
1.	Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian	Kontribusi sector tanaman pangan/ palawija terhadap PDRB	%	2,64)*	3,09	2.50)**	80.98	Tinggi
		Kontribusi sector hortikultura terhadap PDRB	%	0,95)*	1,04	0.94)**	89.98	Tinggi
		Kontribusi sector perkebunan terhadap PDRB	%	11,53)*	11,54	12.18)**	105.59	Sangat Baik
		Kontribusi sector peternakan terhadap PDRB	%	1,11)*	1,17	1.09)**	92.78	Sangat Baik
2.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		76,9	79,90	81,4	101,88	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	nilai	64,30	65	61,01)**	93,86	Sangat Baik
		Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan		Sesuai	Sesuai	Sesuai)**	100	Sangat Baik
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	75,6	75,50	78,8	104,37	Sangat Baik

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Keterangan : )\* = angka sementara

)\*\* = angka sangat sementara

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian sasaran strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Tabel 10.  
Persentase PDRB Sektor Pertanian  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	18,35	17,71	17,16	15,44	16,03	16,75)	16,23)*	16,71)**
2.	Kontribusi sector tanaman pangan terhadap PDRB	3,66	3,52	3,50	2,88	2,94	2,83)	2,64)*	2,50)**
3.	Kontribusi sector tanaman hortikultura terhadap PDRB	1,03	0,96	0,87	0,97	0,99	0,96)	0,95)*	0,94)**
4.	Kontribusi sector perkebunan terhadap PDRB	12,78	12,31	11,69	10,46	10,99	11,86)	11,53)*	12,18)**
5.	Kontribusi sector peternakan terhadap PDRB	0,88	0,92	1,10	1,13	1,11	1,10)	1,11)*	1,09)**

Sumber : BPS Kepulauan Selayar

)\* = Angka sementara

)\*\* = Angka sangat sementara

Nilai PDRB dari 4 sub sektor mengalami fluktuatif. Sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 hal ini disebabkan kurangnya produksi tanaman pangan karena dampak *el nino*. Berkurangnya produksi tanaman pangan yang dipengaruhi oleh kurangnya luas tanam dan luas panen serta kurangnya benih tanaman yang berkualitas. Sub sektor Hortikultura dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan faktor iklim yang sangat berpengaruh terhadap produksi hortikultura, baik buah-buahan maupun sayuran. Selain itu,

penurunan produksi juga dipengaruhi oleh adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang utamanya menyerang tanaman buah. Sub Sektor Perkebunan mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 hal ini disebabkan karena meningkatnya populasi tanaman menghasilkan didukung dengan perawatan, pemangkasan, pemupukan dan peremajaan tanaman serta adanya upaya pengendalian terhadap serangan OPT seperti pengendalian hama kutu perisai pada tanaman kelapa. Sub sector peternakan dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan yang dipengaruhi tingkat produksi ternak yang menurun karena pola manajemen pemeliharaan ternak yang masih kurang dan tidak terarah dimana peternak belum memperhatikan kualitas pakan dan tatacara pemeliharaan yang dianjurkan, perkandangan, penanganan penyakit dan pemasaran diperparah dengan adanya perubahan iklim global dimana ternak yang dipelihara secara ekstensif akan berakibat pada penurunan bobot badan ternak secara drastis sehingga ada kecenderungan peternak untuk menjual ternaknya.

Upaya yang masih perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kontribusi sector pertanian terhadap PDRB antara lain penggunaan sarana pertanian tepat guna baik penggunaan pupuk berimbang maupun penggunaan pestisida sesuai dosis anjuran. Dukungan prasarana pertanian yang lebih baik berupa irigasi untuk pemenuhan kebutuhan air tanaman serta prasarana pertanian lainnya yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan produksi pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan. Selain itu, pengendalian OPT secara terpadu juga sangat mempengaruhi dalam penentuan produksi. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan pemeliharaan ternak mempengaruhi jumlah produksi dan populasi ternak tersebut.

## 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Capaian kinerja nyata indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebesar 81,4 dari target sebesar 79,90 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,88% atau kriteria Sangat Baik.

Tabel diatas menunjukkan target yang diharapkan sebesar 79,90 dan realisasi mencapai 81,4. Hal ini menandakan bahwa meskipun telah melebihi target, namun masih rendah dibandingkan dengan skor PPH ideal yaitu 100. Pola konsumsi pangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan hasil susenas tahun 2023 skor PPH yang mencerminkan keragaman mutu belum memenuhi harapan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Demikian pula dari segi keragaman dan keseimbangannya yaitu konsumsi padi-padian masih berlebih sedangkan konsumsi sayuran dan buah, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan masih kurang. Kondisi ini mencerminkan pola konsumsi pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat tergantung pada padi-padian.

Salah satu upaya dalam meningkatkan skor PPH yaitu penganekaragaman konsumsi pangan melalui pemberdayaan pekarangan pangan oleh masyarakat, menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Skor PPH yang mencerminkan keragaman dan mutu gizi masih kurang yaitu 81,4 (pada tingkat konsumsi) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11.

Situasi Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar  
berdasarkan Konsumsi Energi dan Protein serta Besarnya Skor PPH Tahun 2023

No.	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/ Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal	%	%AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian	343,4	1.359	62,4	64,7	0,5	31,2	32,4	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	39,8	50	2,3	2,4	0,5	1,2	1,2	2,5	1,2
3.	Pangan hewani	137,1	180	8,3	8,6	2,0	16,5	17,1	24,0	17,1
4.	Minyak dan Lemak	26,5	236	10,8	11,2	0,5	5,4	5,6	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	11,2	62	2,9	3,0	0,5	1,4	1,5	1,0	1,0
6.	Kacang-kacangan	21,5	38	1,7	1,8	2,0	3,5	3,6	10,0	3,6
7.	Gula	27,3	101	4,6	4,8	0,5	2,3	2,4	2,5	2,4
8.	Sayur dan Buah	192,1	110	5,0	5,2	5,0	25,2	26,1	30,0	26,1
9.	Lain-lain	57,8	41	1,9	2,0	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>		<b>2.177</b>	<b>100.0</b>	<b>103,7</b>		<b>86,7</b>	<b>89,9</b>	<b>100.0</b>	<b>81,4</b>

*Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*

Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Capaian Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 adalah

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2023

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/ha)	8,48	6,96	82,08	Tinggi
2.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit ternak	0,45	0,99	120	Sangat baik
3.	Cakupan sarana pertanian (%)	100	80	80	Tinggi
4.	Cakupan prasarana pertanian yang digunakan (%)	100	100	100	Sangat baik
5.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Penyakit Hewan Menular	5,28	30,86	120	Sangat baik
6.	Persentase Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	20,89	20,75	99,33	Sangat baik
7.	Cakupan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian (%)	100	100	100	Sangat baik
8.	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	22,72	17,14	75,44	Sedang
9.	Persentase Cadangan Pangan	0,10	0,37	120	Sangat baik
10.	Cakupan ketersediaan infrastruktur cadangan Pangan	62,50	60,87	97,39	Sangat baik

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6
11.	Cakupan Ketahanan dan Diversifikasi Pangan	36,36	51,47	120	Sangat baik
12.	Persentase penanganan kerawanan pangan	57,50	34,78	60,49	Rendah
13.	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	80	100	Sangat baik

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Analisis capaian indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

### 1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun

Produktivitas pertanian dalam hal ini tanaman padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Target kinerja produktivitas pertanian per hektar per tahun di tahun 2023 diharapkan sebesar 8,48 ton/ha. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana pada Tabel 12 diperoleh hasil sebesar 6,96 ton/ha, sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran produktivitas pertanian per hektar per tahun sebesar 82,08%.

Rumus perhitungan produktivitas pertanian per hektar per tahun dihitung dengan :

$$\frac{\sum \text{produksi pertanian (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar)}}{\sum \text{luas panen pertanian (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar)}}$$

Kinerja Produksi padi tahun 2023 mencapai 24.512,88 Ton dengan luas panen 3.367,70 Ha, Jagung mencapai produksi sebesar 6.072,91 Ton dengan luas panen 1.104,10 Ha. Produksi Ubi kayu mencapai 1.526,92 Ton dengan luas panen 145 Ha, sedangkan produksi ubi jalar sebesar 132,90 ton dengan luas panen 13,10 Ha.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melakukan upaya dalam rangka pencapaian kinerja produktivitas pertanian per hektar per tahun, di antaranya melalui komitmen pimpinan dalam

pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi pangan strategis. Selain itu, dalam rangka mencapai kinerja sasaran ini telah dikeluarkan kebijakan pembangunan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan.

Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi pangan strategis tahun 2023, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

## **1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**

### **a. Padi**

Produksi Tanaman Padi Tahun 2023 sebesar 24.512,88 Ton mengalami penurunan 28,69% dibandingkan tahun 2022. Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan (Padi) Tahun 2023 sebesar 72,79 Ku/Ha.

Pencapaian kinerja produksi padi mengalami beberapa hambatan, antara lain:

1. Pengaruh curah hujan yang rendah menyebabkan bergesernya musim tanam dan waktu panen, sehingga pertanamannya belum berkontribusi terhadap produksi padi 2023.
2. Penurunan luas tanam dan panen
3. Perubahan produktivitas dan produksi padi di lahan sawah tadah hujan dan lahan sawah  $\frac{1}{2}$  irigasi.
4. Kurangnya prasarana irigasi, sehingga beberapa wilayah hanya melakukan satu kali tanam.
5. Adanya alih fungsi lahan dan persaingan antar komoditas.

Rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut, antara lain:

1. Penggunaan varietas padi unggul yang tahan kekeringan/ banjir serta berumur genjah;
2. Meningkatkan teknik dan intensifikasi budidaya tanaman padi misalnya PTT, SRI, dan sistem Legowo;
3. dan optimalisasi pemanfaatan lahan tidur dan pembukaan lahan sawah baru;
4. Pengendalian OPT dan DPI (Banjir dan Kering);
5. Menyiagakan alsintan dan alat pengering padi (pascapanen);
6. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier, kuarter, dan lainnya berkoordinasi Pusat dan Daerah.

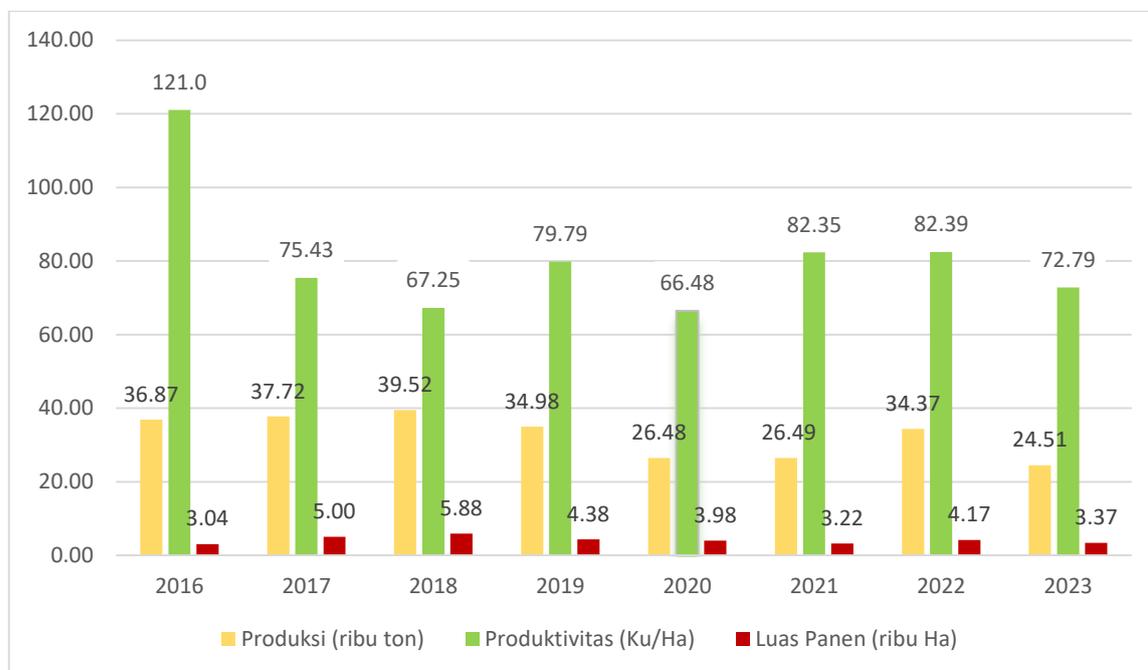
Tabel 13. Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas Padi 2016 – 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan produksi pertanian tanaman Padi (ton)	36.865,26	37.715	39.523	34.979	26.477,38	26.490,60	34.373,58	24.512,88)*
2.	Tingkat produktivitas pertanian tanaman Padi (kw/ha)	121,08	75,43	67,25	79,79	66,48	82,35	82,39	72,79)*
3.	Luas Panen (Ha)	3.044,70	5.000	5.877,03	4.383,88	3.984,75	3.216,83	4.172,06	3.367,70)*

Catatan : )\* = data sementara

Perkembangan produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertera pada Grafik berikut ini :

Grafik 1. Perkembangan produksi, produktivitas dan luas panen padi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2023



### b. Jagung

Produksi tanaman Jagung tahun 2023 sebesar 6.072,91 Ton, mengalami penurunan 48,25% dari tahun 2022 dengan tingkat produktivitas Jagung sebesar 55,00 Ku/Ha tahun 2023. Perkembangan produksi jagung Tahun 2016-2023 sangat fluktuatif, demikian juga dengan produktivitas dan luas panen jagung mengalami fluktuasi selama 2016- 2023.

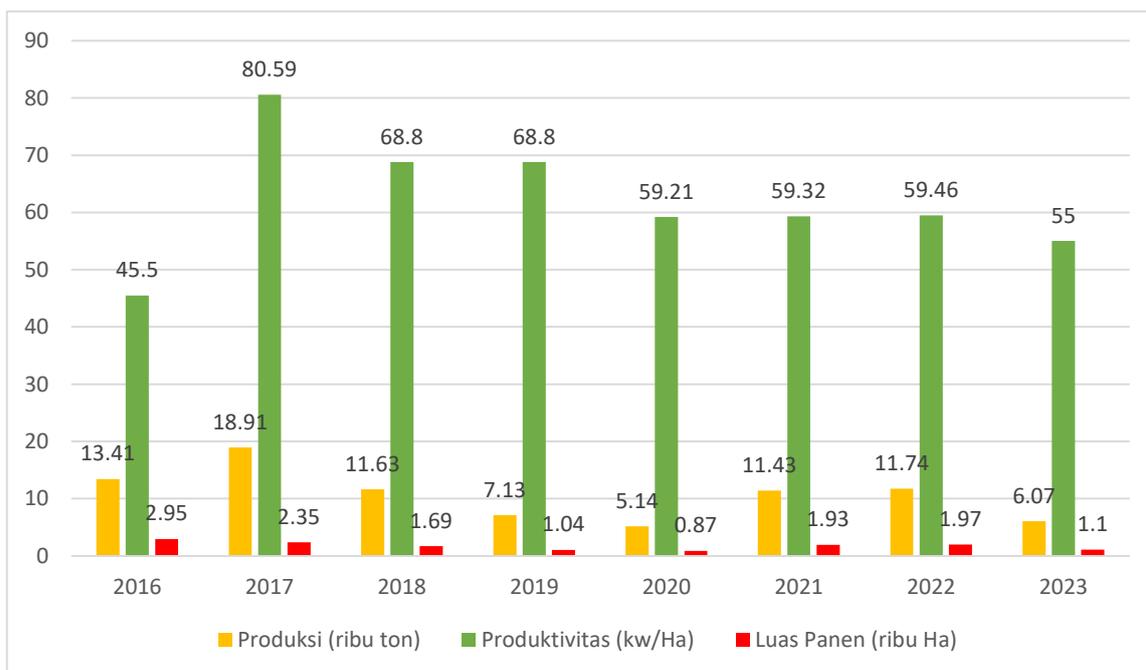
Tabel 14. Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas Jagung 2016 – 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan produksi pertanian tanaman Jagung (ton)	13.411,89	18.914	11.634	7.127	5.144,72	11.432,10	11.736,22	6.072,91)*
2.	Tingkat produktivitas pertanian tanaman Jagung (kw/ha)	45,50	80,59	68,80	68,80	59,21	59,32	59,46	55,00)*
3.	Luas Panen (Ha)	2.947,67	2.346,94	1.690,99	1.035,90	868,89	1.927,19	1.973,90	1.104,10)*

Catatan : )\* = data sementara

Secara grafik, perkembangan produksi, produktivitas dan luas panen jagung di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertera pada Grafik berikut ini :

Grafik 2. Perbandingan Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2023



Sama hal dengan tanaman padi, tanaman jagung mengalami penurunan produksi di tahun 2023 sebesar 48,25% dibandingkan dengan jumlah produksi jagung tahun 2022. Hal ini disebabkan karena kondisi iklim yang tidak menentu sebagai dampak *el nino* dimana curah hujan yang rendah akan mempengaruhi produksi dan produktivitas tanaman. Selain itu, bantuan benih jagung tahun 2023 hanya sebesar 200 Ha sangat kurang dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 1000 Ha.

## **2. Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura**

### **a. Jeruk Keprok**

Produksi Jeruk Keprok tahun 2023 sebesar 3.437 Ton mengalami peningkatan 101,57% dari tahun 2022 dengan tingkat produktivitas sebesar 68,07 Ku/Ha. Peningkatan produksi dan produktivitas jeruk keprok disebabkan beberapa hal, antara lain :

1. adanya anomali iklim dimana curah hujan rendah sangat mempengaruhi/memicu pembentukan buah.
2. Telah dilakukan pengendalian OPT pada tanaman jeruk yang juga mempengaruhi proses budidaya tanaman jeruk untuk tumbuh dengan baik dan berkontribusi positif dalam pembentukan bakal buah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah:

1. Pengembangan Kampung Hortikultura dalam upaya mengonsolidasikan lahan-lahan dalam satu kawasan kesatuan administratif yaitu kampung atau desa dengan luasan minimal 10 ha untuk komoditas strategis. Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa benih bermutu, saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa Plastik, dan lain-lain), dan pengendali OPT ramah lingkungan.
2. Melaksanakan Program Prioritas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pengembalian kejayaan Jeruk Keprok Selayar dengan memanfaatkan fasilitasi bantuan yang telah diberikan kepada kelompok tani berupa benih/bibit, pupuk organik, kawat duri dan pengendalian OPT.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas Jeruk Keprok 2016 – 2023

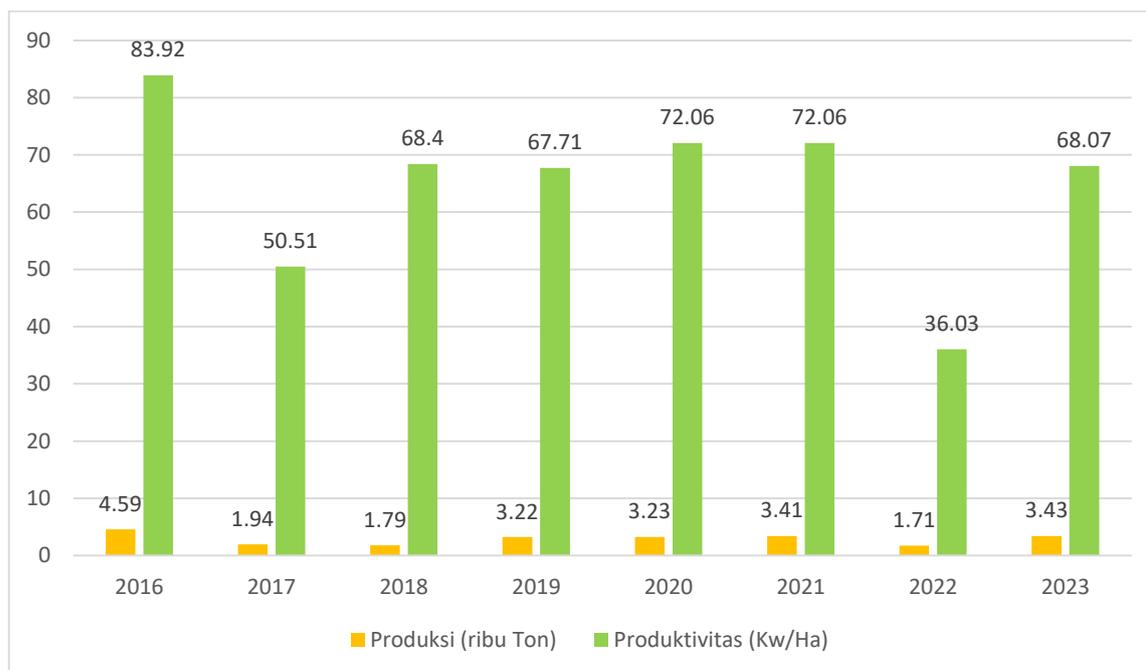
No	Indikator Kinerja	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan produksi pertanian tanaman Jeruk Keprok (ton)	4.599,89	1.937,49	1.792,58	3.219,8	3.228,8	3.410,16	1.705,08	3.437)*
2.	Tingkat produktivitas pertanian tanaman Jeruk Keprok (kw/ha)	83,92	50,51	68,4	67,71	72,06	72,06	36,03	68,07)*

*Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*

*Catatan : )\* = data sementara*

Secara grafik, perkembangan produksi dan produktivitas Jeruk Keprok di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertera pada Grafik berikut ini :

Grafik 3. Perbandingan produksi dan produktivitas Jeruk Keprok di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2023



### 3. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

#### a. Kelapa, Pala, Jambu Mete dan Cengkeh

Produksi kelapa tahun 2023 sebesar 26.725,35 Ton mengalami penurunan (0,03)% dari tahun 2022. Produksi Pala tahun 2022 sebesar 410,41 Ton mengalami peningkatan 0,03% dari tahun 2022. Produksi Cengkeh tahun 2023 sebesar 492,43 Ton mengalami peningkatan sebesar 546,57% dari tahun 2022. Produksi Jambu Mete sebesar 2.404,54 Ton di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (0,41)% dari tahun 2022.

Tingkat produktivitas tanaman perkebunan tahun 2023 untuk kelapa sebesar 1.537,68 Kg/Ha, Pala sebesar 239,73 Kg/Ha, Cengkeh sebesar 520,26 Kg/Ha, dan Jambu Mete sebesar 664,97 Kg/Ha

dengan persentase penurunan produktivitas kelapa (2,98)%, dan jambu mete (0,41)% dari tahun 2022. Sedangkan tanaman cengkeh mengalami peningkatan produktivitas sebesar 542,14% dan pala sebesar 0,03% dari tahun 2022.

Pencapaian kinerja tahun 2023 ini tidak lepas dari dukungan anggaran, baik dari APBD, APBD Provinsi maupun APBN. Adanya upaya petani melakukan budidaya secara baik diantaranya melakukan perawatan, pemangkasan, pemupukan, peremajaan serta rehabilitasi terhadap tanaman perkebunan yang sudah tua. Selain itu juga, terdapat program pemerintah seperti intensifikasi dan pengendalian OPT secara terpadu. Penurunan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan seperti kelapa dan jambu mete disebabkan karena adanya serangan hama kutu perisai (*Aspidiotus destructor*) pada tanaman kelapa dan factor curah hujan rendah juga mempengaruhi produksi tanaman.

Peningkatan produktivitas dan produksi ini juga tidak terlepas dari meningkatnya tanaman menghasilkan. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, berbagai upaya dilakukan antara lain konservasi lahan, sanitasi kebun, perawatan, peningkatan luas areal yang produktif, dan meningkatnya tanaman menghasilkan. Selain itu upaya pendampingan berkelanjutan terus dilakukan guna memberikan bimbingan dan transfer pengetahuan kepada petani kelapa, pala, cengkeh dan jambu mete di Kabupaten Kepulauan Selayar.

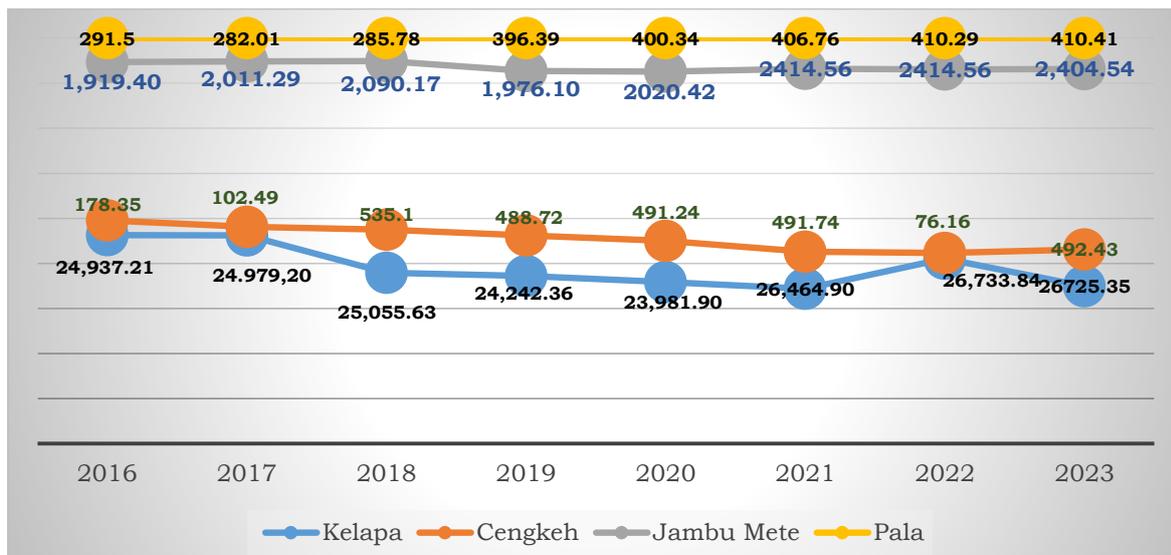
Tabel 16. Capaian Produksi dan Produktivitas perkebunan (Kelapa, Pala, Cengkeh, Jambu Mete) 2016 – 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan produksi Perkebunan (Kelapa)	24.937,21	24.979,2	25.055,63	24.342,36	23.981,90	26.464,14	26.733,84	26.725,35)*
2.	Peningkatan produksi Perkebunan (Pala)	291,5	282,01	285,78	396,39	400,34	406,76	410,28	410,41)*
3.	Peningkatan produksi Perkebunan (Cengkeh)	178,35	102,49	535,1	488,72	491,24	491,74	76,16	492,43)*
4.	Peningkatan produksi Perkebunan (Jambu Mete)	1.919,4	2.011,29	2.090,17	1.976,1	2.020,42	2.414,56	2.414,56	2.404,54)*
5.	Tingkat produktivitas Perkebunan (Kelapa)	1.484	1.474	1.462	2.006	1.385	1.500	1.538,55	1.537,68)*
6.	Tingkat produktivitas Perkebunan (Pala)	304	292	283	235	234	237,59	239,65	239,73)*
7.	Tingkat produktivitas Perkebunan (Cengkeh)	218	125	568	524	523	527,62	81,02	520,26)*
8.	Tingkat produktivitas Perkebunan (Jambu Mete)	537	557	579	547	560	667,74	667,74	664,97)*

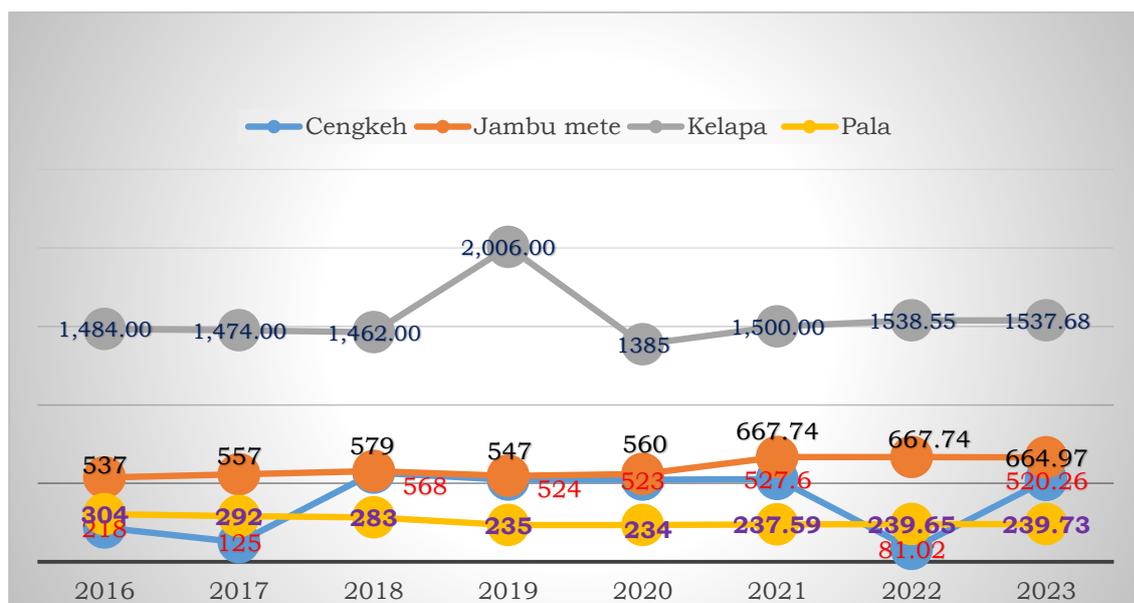
Catatan : )\* = data sementara

Secara grafik, perkembangan produksi dan produktivitas perkebunan (Kelapa, Pala, Cengkeh, Jambu Mete) di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertera pada Grafik berikut ini :

Grafik 4. Perbandingan Produksi Perkebunan (Kelapa, Pala, Cengkeh, Jambu Mete) di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2023



Grafik 5. Perbandingan perkembangan produktivitas perkebunan (Kelapa, Pala, Cengkeh, Jambu Mete) di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2023



#### **4. Peningkatan Populasi Ternak**

Populasi Sapi Potong tahun 2023 sebesar 21.186 ekor mengalami penurunan (9,97)% dari tahun 2022. Populasi Kerbau tahun 2023 sebesar 4.618 mengalami penurunan (8,95)% dari tahun sebelumnya. Populasi Kuda sebesar 4.962 ekor mengalami peningkatan 4,20% dari tahun 2022. Populasi Kambing sebesar 90.205 ekor mengalami penurunan (3,78)% dari tahun 2022. Populasi Domba tahun 2023 sebesar 99 ekor mengalami peningkatan sebesar 182,86% dari tahun 2022.

Dinamika populasi ternak adalah adanya kematian, kelahiran, pemotongan, ternak masuk dan ternak keluar. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan populasi ternak adalah pengeluaran ternak, karena Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan zona hijau dalam kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga dinyatakan aman untuk kegiatan pengeluaran ternak ke Kabupaten Lain.

Perhatian pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada sektor Peternakan melalui upaya peningkatan sarana dan prasarana peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan pengadaan obat-obatan ternak.

Populasi Ayam Buras tahun 2023 sebesar 495.897 ekor mengalami peningkatan 7,08% dari tahun 2022. Populasi Ayam Ras Pedaging sebesar 2.460 ekor mengalami penurunan sebesar (79,69)% dari tahun 2022. Populasi Ayam Ras Petelur sebesar 13.049 ekor mengalami peningkatan sebesar 47,93%. Populasi Itik tahun 2023 sebesar 8.479 ekor mengalami peningkatan 20,37%.

Peningkatan populasi ayam Buras, Ayam Petelur dan itik disebabkan karena sistem budidaya ayam buras, ayam petelur dan itik lebih baik dari aspek pemeliharaan dan perkembangbiakan. Ayam ras petelur mengalami peningkatan populasi karena masih ada ayam buras berproduksi di akhir tahun serta banyak yang melakukan ready stock dipertengahan tahun 2023.

Populasi unggas lainnya seperti ayam ras pedaging mengalami penurunan karena banyak dilakukan pemotongan pada ayam ras pedaging untuk acara atau pesta, jamuan hari-hari besar dan bahkan untuk konsumsi sehari-hari.

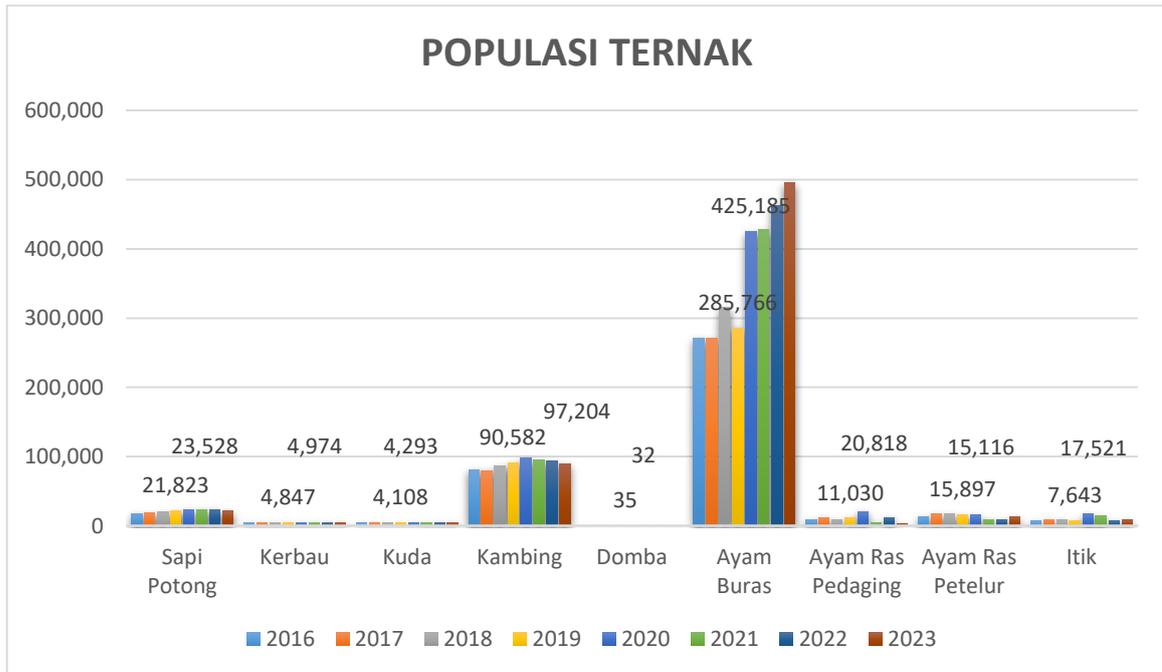
Tabel 17. Perbandingan Capaian Populasi Ternak (ekor) 2016 – 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan populasi sapi potong	18.060	18.894	19.996	21.823	23.528	23.688	23.532	21.186
2.	Peningkatan populasi Kerbau	4.674	4.648	4.727	4.847	4.974	5.083	5.072	4.618
3.	Peningkatan populasi Kuda	3.856	3.869	3.975	4.108	4.293	4.601	4.762	4.962
4.	Peningkatan populasi Kambing	81.465	80.089	86.730	90.582	97.204	94.804	93.751	90.205
5.	Peningkatan populasi Domba	46	56	41	35	32	32	35	99
6.	Peningkatan populasi Ayam Buras	271.014	270.111	315.621	285.766	425.174	428.589	463.094	495.897
7.	Peningkatan populasi Ayam Ras Pedaging	8.968	12.027	9.019	11.030	22.602	3.871	12.113	2.460
8.	Peningkatan populasi Ayam Ras Petelur	13.371	16.770	17.226	15.897	10.439	9.516	8.821	13.049
9.	Peningkatan populasi Itik	6.886	9.525	8.240	7.643	15.663	13.994	7.044	8.479

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Secara grafik, perkembangan populasi ternak di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertera pada Grafik berikut ini :

Grafik 6. Perbandingan populasi ternak di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2023



## 2. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit ternak

Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebanyak 1.013 kasus, mengalami penurunan sebesar (67,49%) dari tahun 2022 yaitu 3.116 kasus penyakit. Capaian penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit tahun 2023 sangat signifikan karena pemeliharaan dan pelayanan kesehatan hewan semakin baik.

Kasus penyakit ternak pada sapi adalah *Baliziekte*, *Bovine Ephemeral Fever (BEF)*, *Enteritis*, *Helminthiasis*, *indigeti*, *Infestasi ektoparasit*, *Thelaziasis*, *Vulnus*, *Abses*, *Bonive Papilloma Virus*, *Ringworm*, *Fraktur*, *Hipofungsi ovarii*. Selain itu terdapat pula

pemberian obat cacing pada sapi dan penanganan keracunan. Ternak sapi yang ditangani sebanyak 1.041 ekor. Kasus penyakit ternak pada kambing yang sering terjadi adalah *Helminthiasis*, *Myasis*, *Scabies*, *Malnutrisi*, *Distokia*, *Vulnus*, *Abses*, dan pemberian obat cacing. Ternak kambing yang ditangani sebanyak 69 ekor, sedangkan ternak kerbau sebanyak 33 ekor dengan penyakit *Distokia*.

Cakupan area pelayanan kesehatan hewan juga ditentukan oleh kasus penyakit ternak pada suatu wilayah. Luasan area yang dapat ditanggulangi dari bencana/ penyakit ternak adalah 325 area dengan luas yang terdampak bencana adalah 1.053 area atau sekitar 30,86%. Capaian tersebut signifikan jika dibandingkan dengan target fasilitasi penanggulangan bencana/penyakit ternak yaitu 5,28%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dengan melaksanakan program Inovasi Poster Tanadoang. Pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan program Pelayanan Publik dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan serta menekan angka kejadian penyakit dan kematian ternak yang dapat menimbulkan dampak ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat peternak di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pelayanan kesehatan hewan sebagai upaya medik meliputi : 1). Promotif; 2). Preventif; 3). Kuratif; 4). Rehabilitatif; dan 5). Pelayanan medik reproduktif.

### **3. Cakupan Sarana Pertanian**

Cakupan sarana pertanian tahun 2023 dengan target 100% terealisasi sebesar 80%, hal ini disebabkan karena adanya sarana pertanian yang belum dapat berfungsi dengan baik dalam peningkatan produksi. Sarana pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi Bibit tanaman = 23.973 pohon, Pestisida (Roundup) = 1.058 botol, Kawat duri = 282 roll, Bak Fiber = 4 buah, Ayam pullet = 440 ekor.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memfasilitasi bantuan sarana pertanian kepada kelompok tani (poktan) atau Gabungan kelompok tani (Gapoktan). Sarana pertanian berupa bibit tanaman meliputi bibit tanaman hortikultura (alpukat, mangga, dan sukun) dan bibit tanaman perkebunan (pala).

### **4. Cakupan Prasarana Pertanian**

Prasarana pertanian tahun 2023 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi pembangunan irigasi sebanyak 1 unit, pembangunan jalan usaha tani 9 unit dan pembangunan DAM Parit 1 unit. Dari target cakupan prasarana pertanian 100%, realisasi sebesar 100% dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/petani secara maksimal.

Pengembangan sumber air areal tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan satu bentuk upaya pengembangan sumber air irigasi untuk usaha pertanian. Kegiatan ini dikembangkan melalui kegiatan irigasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas pertanaman (IP) sebesar 200 pada lahan sawah serta meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian.

Pembangunan jalan usaha tani sebagai prasarana transportasi untuk mempermudah akses produksi, mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan.

## **5. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)**

Fasilitasi pengendalian OPT oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023 meliputi pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Cakupan area terkena bencana OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah 1.477,82 Ha dan dapat ditanggulangi seluas 306,65 Ha atau 20,75%. Capaian indicator cakupan area pengendalian OPT dari target sebesar 20,89% adalah 99,33%.

Pengendalian OPT ini adalah tindakan untuk mencegah kerugian pada tanaman budidaya yang diakibatkan oleh OPT baik hama, gulma, serangga pengganggu sehingga dapat menghindari kerugian ekonomi berupa kehilangan hasil panen serta penurunan kualitas/mutu produk panen. Kegiatan ini dilakukan pula sosialisasi dan implementasi penanganan hama kutu perisai (*Aspidiotus destructor*) pada tanaman kelapa di Desa Buki Timur Kec. Buki, Desa Bonea Makmur, Baturapak Desa Polebunging, Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai, dan Kel. Batangmata Sapu Kec. Bontomatene.

## **6. Izin Usaha Pertanian**

Izin usaha pertanian selama tahun 2023 sebanyak 265 izin meliputi sector peternakan yaitu penerbitan izin pengeluaran ternak Target cakupan fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian sebesar 100% dengan realisasi capaian adalah 100%.

## **7. Penyuluhan Pertanian**

Cakupan Bina Kelompok Tani sebesar 26,95% dimana kelompok tani dan gabungan kelompok tani tahun 2023 masing-masing sebanyak 887 poktan, 81 Gapoktan. Sedangkan Poktan dan Gapoktan yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mendapatkan bantuan sarana pertanian sebanyak 166 poktan/Gapoktan. Dari target indicator cakupan bina kelompok tani

sebesar 17,14% diperoleh hasil atau realisasi capaian adalah 22,72% atau sebesar 75,44%.

Kegiatan penyuluhan melibatkan pelaku utama yaitu, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Petani, yang terkadang sangat dinamis. Hal ini merupakan tantangan yang sering di temui para penyuluh di lapangan. Melihat tantangan yang sulit akan dihadapi oleh para penyuluh maka perlu metode-metode yang jitu untuk menyampaikan teknologi-teknologi pertanian sehingga para petani mau mengadopsi teknologi tersebut. Tahun 2023 dilakukan kegiatan Pekan Nasional (PENAS) di Sumatera Barat Padang yang melibatkan penyuluh pendamping, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Tim Teknis. Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan Indonesia merupakan ajang berkumpul dan bersilaturahmi bagi para kontak tani, nelayan dan petani hutan untuk saling memperlihatkan pencapaiannya selaku pelaku utama dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Tujuan umum pelaksanaan Penas adalah untuk meningkatkan motivasi dan kegiarahan petani nelayan dan masyarakat pelaku agribisnis dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Tujuan khususnya, meliputi meningkatnya kepemimpinan dan kemandirian kontak tani nelayan selaku pelaku utama sistem dan usaha agribisnis, terjalinnya kemitraan usaha dan informasi agrobisnis antara peserta dengan para pengusaha di bidang agribisnis. Meningkatnya jiwa wirausaha dan kesadaran terhadap lingkungan serta keakraban bagi peserta dan meningkatnya apresiasi para peserta dan masyarakat pelaku agribisnis untuk memacu prestasi dalam pembangunan pertanian dan pedesaan.

Metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu

menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kegiatan penyuluhan lainnya berupa pelatihan tematik dengan tema pembuatan pupuk hayati dan pestisida nabati dengan peserta pelatihan adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kelompok Tani (Poktan) dari 11 kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan. Selain itu, dilakukan pula kegiatan sosialisai geospasial untuk penyuluh pertanian pada 10 BPP di Kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian dalam pemetaan lahan pertanian.

## **8. Cadangan Pangan**

Pengembangan cadangan pangan pemerintah merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. Pengembangan cadangan pangan pemerintah bertujuan untuk *pertama*, meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; *kedua*, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; *ketiga*, instrumen stabilisasi harga; dan keempat, meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (CBPK) adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota yang didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras per kapita per tahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional. CBPK memiliki proporsi 75%

Berikut perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

$$I. DDCBD = \Sigma \{(\%WTB+\%PKP) \times IRBI \times Pop \times K\}$$

dimana

DDCBD adalah jumlah cadangan beras pemerintah provinsi + cadangan beras kab/kota + cadangan beras desa + cadangan beras masyarakat di 1 wilayah provinsi

WTB : Wilayah terdampak bencana

PKP : Prevalensi kerawanan pangan

IRBI : Indeks kerawanan bencana

Pop : Jumlah penduduk

K : Konsumsi per kapita per tahun

$$DDCBD = \Sigma \{(\%WTB+\%PKP) \times IRBI \times Pop \times K\}$$

$$\begin{aligned} DDCBD &= (0,49+0,14) \times 1 \times 139.145 \times 0,10 \\ &= 8.766,14 \text{ Ton} \end{aligned}$$

$$II. CBD = 0.5 \% \times CBPD$$

CBPD adalah jumlah cadangan beras pemerintah provinsi + total cadangan beras kab/kota di 1 wilayah provinsi

$$\begin{aligned} CBD &= 0.5 \% \times 473.107,12 \\ &= 2.367,71 \text{ Ton} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} III. CBPK &= [(A + P)/2] \times 75\% \times CBD \\ &= [(0,03+0,00)/2] \times 75\% \times 2.367,71 \\ &= 26,64 \text{ Ton} \end{aligned}$$

Jadi Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten (CBPK) Kepulauan Selayar adalah 26,64 Ton dengan kebutuhan pangan 15.932,10 Ton, sehingga diperoleh persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan) sebesar 0,17%.

## **9. Ketersediaan Infrastruktur Pangan**

Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis oleh kelembagaan lumbung pangan masyarakat. Hal ini mempengaruhi penanganan kerawanan pangan yang dilakukan pada 31 desa/kelurahan yang termasuk desa rawan pangan prioritas 1-3 (sangat rentan - agak rentan). Tahun 2023 terdapat 14 desa yang keluar dari desa rawan pangan priritas 1-3.

Lumbung Pangan Masyarakat dan gudang pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu:

1. Lumbung pangan Masyarakat “**NUSA INDAH**“ Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu.
2. Lumbung Pangan Masyarakat “**PADAIDI**” Desa ontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur.
3. Lumbung Pangan Masyarakat “**BINA SEJAHTERA**” Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur.
4. Lumbung Pangan masyarakat “**DAMAI SEJAHTERA**“ Desa Batang Kecamatan Takabonerate
5. Lumbung Pangan Masyarakat “**SUMBER MAKMUR**” Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu.
6. Lumbung Pangan Masyarakat “**MINASA SAYANG**“ Desa Ma’minasa Kecamatan Pasimasunggu.
7. Lumbung Pangan Masyarakat “**LABUANG BIROPA**” Desa Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu.

8. Lumbung Pangan Masyarakat “**RAJUNI SEJAHTERA**” Desa Rajuni Kecamatan Takabonerate.
9. Gudang Pangan Matalalang Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu.

## **10. Diversifikasi dan Ketahanan Pangan**

Cakupan diversifikasi dan ketahanan pangan diasumsikan sebagai persentase dari jumlah konsumsi pangan non beras terhadap jumlah konsumsi keseluruhan. Konsumsi pangan non beras diantaranya adalah padi-padian, umbi-umbian, buah dan sayur, serta pangan hewani. Target capaian dari cakupan diversifikasi dan ketahanan pangan sebesar 36,36% sedangkan realisasi tahun 2023 mencapai 51,47% atau sebesar 141,56%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penganekaragaman konsumsi non beras lebih baik dari tahun sebelumnya. Produksi Ubi Kayu, Ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kentang, dan pisang yang merupakan pangan lokal sumber karbohidrat non beras memiliki potensi untuk dikembangkan ke arah komersialisasi pangan lokal yang berdaya saing dalam upaya mendukung ketahanan pangan.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi, salah satunya adalah mensukseskan diversifikasi pangan adalah :

1. Menghadirkan budaya atau kebiasaan mengonsumsi makanan pokok selain beras. Disinilah, nantinya masyarakat yang memilih komoditas apa yang dikonsumsi, pengganti beras.
2. Komoditi pengganti beras harus mudah dipersiapkan. Artinya, komoditi selain beras mudah didapatkan bagi masyarakat. Sehingga, dengan mudahnya masyarakat mendapatkan komoditi selain beras itu, menjadikan masyarakat mau mencoba mengonsumsi selain beras. Jika ini benar-benar bisa dipenuhi besar kemungkinan diversifikasi pangan akan sukses diterima masyarakat.

3. Menekan terjadinya masalah harga. Artinya, melalui komoditi yang tersedia perlu diupayakan harganya tidak terlalu mahal. Apalagi, mahalnya melebihi harga beras. Jadi, intinya. masalah harga perlu terjangkau oleh masyarakat.
4. Diverifikasi pangan juga bermanfaat untuk memperoleh nutrisi dari sumber gizi yang lebih beragam dan seimbang. Artinya, penting adanya diversifikasi pangan untuk bisa disosialisaikan. Terutama, terkait kandungan gizi dan nutrisi yang terdapat dalam varian atau ragamnya pangan nusantara.

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan melalui program pemberdayaan pekarangan bertujuan mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan belum dimanfaatkan secara optimal. Pekarangan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penghasil pangan, dalam memperbaiki gizi keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Manfaatnya sangat besar, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk itu, Pemerintah telah menganjurkan agar memanfaatkan setiap jengkal tanah termasuk lahan tidur maupun tanah kosong yang tidak produktif.

Pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan pada tingkat kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai kegiatan lainnya dalam mewujudkan pengembangan ekonomi daerah, baik dalam pelaksanaan maupun pembiayaannya. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, gerakan P2KP ini juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) guna menunjang hidup sehat, aktif dan produktif.

## **11. Penanganan Kerawanan Pangan**

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Capaian penanganan kerawanan pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023 sebesar 19,35% dari target 52,50% atau sebesar 36,86%. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kerawanan pangan pada desa/kelurahan masih rendah sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kondisi rawan pangan disebabkan oleh beberapa factor, antara lain : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

Tahun 2023, di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 88 Desa/Kelurahan menunjukkan hasil prioritas komposit, Tidak terdapat desa yang terindikasi Sangat Rentan Terhadap Kerawanan Pangan atau prioritas 1, Desa/Kelurahan yang terindikasi Rentan Terhadap Kerawanan Pangan atau Prioritas 2 terdapat 10 desa (11,36%), Desa/Kelurahan yang terindikasi Prioritas 3 atau Agak Rentan Terhadap Kerawanan Pangan terdapat 13 Desa (14,77%), Desa/Kelurahan yang

terindikasi Prioritas 4 atau Agak Tahan Terhadap Kerawanan Pangan terdapat 25 Desa (28,41%), Desa/Kelurahan yang terindikasi Prioritas 5 atau Tahan Terhadap Kerawanan Pangan terdapat 32 Desa (36,36%), dan Desa/Kelurahan yang terindikasi Prioritas 6 atau Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan terdapat 8 Desa (9,09%).

## **12. Pengawasan Pangan Segar**

Capaian pengawasan pangan segar sebesar 80%, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keamanan dan mutu pangan telah menjadi perhatian, mengingat bahan pangan khususnya pangan segar adalah produk yang memiliki karakteristik mudah rusak akibat kontaminasi oleh cemaran kimia, fisik maupun mikrobiologi. Keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan akan tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari bahan pangan itu sendiri. Keamanan pangan sudah menjadi persyaratan utama yang wajib dipenuhi dalam perdagangan nasional maupun internasional, oleh karena dukungan lembaga pengawas keamanan pangan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tersedianya pangan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Pangan Segar Asal Tumbuhan merupakan pangan yang beresiko tinggi terhadap cemaran kimia (residu pestisida, mikotoksin, logam berat) yang dapat mengganggu kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan. Pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan dalam rangka upaya untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang mengkonsumsi pangan khususnya pangan segar.

Kegiatan pengawasan keamanan pangan segar dilakukan melalui penyampaian-penyampaian kepada petani dan kelompok tani tentang bahaya penggunaan pestisida serta pelatihan-pelatihan pembuatan pestisida nabati pada Kelompok Wanita Tani (KWT).

Uji sampel pangan segar berupa sayuran tidak terlaksana karena pelaksana untuk uji sampel pangan segar belum tersedia pada e-katalog lokal Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **Capaian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan perdesaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar.

Program dan kegiatan dilaksanakan tiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan perencanaan kinerja. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan 9 Program dan 20 kegiatan dengan 39 sub kegiatan.

Tabel 18. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RKPD Tahun 2023	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>36,36%</b>	<b>51,47%</b>
					<b>Alokasi Anggaran Rp. 55.223.500</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp. 37.336.200</b>
			DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan TA. 2023	<i>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</i>	80.2%	160,16%
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 16.716.000</i>	<i>Realisasi Anggaran Rp. 16.668.800</i>
				Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 laporan	1 laporan
					Alokasi Anggaran Rp. 9.442.000	Realisasi Anggaran Rp. 9.428.400
				Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	1 dokumen	1 dokumen
					Alokasi Anggaran Rp. 7.274.000	Realisasi Anggaran Rp. 7.240.400
				<i>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</i>	15%	0%
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 21.750.000</i>	<i>Realisasi Anggaran Rp. 4.500.000</i>
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	1180 Kg	0 Kg
					Alokasi Anggaran Rp. 21.750.000	Realisasi Anggaran Rp. 4.500.000
				<i>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	6	0.16
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 16.757.500</i>	<i>Realisasi Anggaran Rp. 16.167.400</i>
				Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	1 laporan
					Alokasi Anggaran Rp. 16.757.500	Realisasi Anggaran Rp. 16.167.400

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi
2.				<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>57,50%</b>	<b>34,78%</b>
					<b>Alokasi Anggaran Rp. 7.635.000</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp. 7.091.400</b>
				<i>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<i>1 peta</i>	<i>1 peta</i>
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 7.635.000</i>	<i>Realisasi Anggaran Rp. 7.091.400</i>
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 dokumen	1 dokumen
					Alokasi Anggaran Rp. 7.635.000	Realisasi Anggaran Rp. 7.091.400
3.				<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
					<b>Alokasi Anggaran Rp. 6.762.000</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp. 222.000</b>
				<i>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kabupaten/ Kota</i>	<i>80%</i>	<i>80%</i>
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 6.762.000</i>	<i>Realisasi Anggaran Rp. 222.000</i>
				Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan kabupaten/ kota	1 dokumen	0 dokumen
					Alokasi Anggaran Rp. 6.762.000	Realisasi Anggaran Rp. 222.000
4.	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota</b>	<b>70,28%</b>	<b>95,43%</b>
					<b>85,00%</b>	<b>91,17%</b>
				<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 20.100.000</i>	<i>Realisasi Anggaran Rp. 20.100.000</i>
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen
					Alokasi Anggaran Rp. 11.879.000	Alokasi Anggaran Rp. 11.879.000

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan
					Alokasi Anggaran Rp. 2.222.000	Alokasi Anggaran Rp. 2.222.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan
					Alokasi Anggaran Rp. 5.999.000	Alokasi Anggaran Rp. 5.999.000
				<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%
					Alokasi Anggaran Rp. 10.310.618.676	Realisasi Anggaran Rp. 10.188.167.081
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	114 orang	125 orang
					Alokasi Anggaran Rp. 10.301.820.676	Alokasi Anggaran Rp. 10.179.369.081
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen
					Alokasi Anggaran Rp. 3.636.000	Alokasi Anggaran Rp. 3.636.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan
					Alokasi Anggaran Rp. 5.162.000	Alokasi Anggaran Rp. 5.162.000
				<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	100%	100%
					Alokasi Anggaran Rp. 4.061.400	Realisasi Anggaran Rp. 4.061.400
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan
					Alokasi Anggaran Rp. 4.061.400	Realisasi Anggaran Rp. 4.061.400

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi
				<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	100%
					Alokasi Anggaran Rp. 20.493.600	Alokasi Anggaran Rp. 19.489.600
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen
					Alokasi Anggaran Rp. 10.151.600	Alokasi Anggaran Rp. 10.075.600
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	185 orang	150 orang
					Alokasi Anggaran Rp. 10.342.000	Alokasi Anggaran Rp. 9.414.000
				<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%
					Alokasi Anggaran Rp. 389.693.900	Realisasi Anggaran Rp. 385.622.900
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	2 paket
					Alokasi Anggaran Rp. 30.413.900	Alokasi Anggaran Rp. 29.942.900
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 dokumen	3 dokumen
					Alokasi Anggaran Rp. 9.280.000	Alokasi Anggaran Rp. 5.800.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan
					Alokasi Anggaran Rp. 350.000.000	Alokasi Anggaran Rp. 349.880.000
				<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%
					Alokasi Anggaran Rp. 943.485.000	Realisasi Anggaran Rp. 923.574.248
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan
					Alokasi Anggaran Rp. 85.678.000	Alokasi Anggaran Rp. 85.678.000

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan Alokasi Anggaran Rp. 94.960.000	1 laporan Alokasi Anggaran Rp. 84.105.248
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan Alokasi Anggaran Rp. 762.847.000	1 laporan Alokasi Anggaran Rp. 753.791.000
				<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100% Alokasi Anggaran Rp. 155.010.000	100% Realisasi Anggaran Rp. 138.630.122
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan/ jabatan	1 unit Alokasi Anggaran Rp. 41.630.000	1 unit Alokasi Anggaran Rp. 41.543.522
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas operasional/ lapangan	70 unit Alokasi Anggaran Rp. 103.310.000	53 unit Alokasi Anggaran Rp. 88.550.600
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit Alokasi Anggaran Rp. 10.070.000	15 unit Alokasi Anggaran Rp. 8.536.000
5.				<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>100%</b> <b>Alokasi Anggaran Rp. 1.956.515.800</b>	<b>80%</b> <b>Alokasi Anggaran Rp. 1.280.829.448</b>
				<i>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	85% Alokasi Anggaran Rp. 844.495.500	80% Realisasi Anggaran Rp. 443.050.900
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan Alokasi Anggaran Rp. 385.214.000	1 laporan Alokasi Anggaran Rp. 308.269.000

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan Alokasi Anggaran Rp. 459.281.500	1 laporan Alokasi Anggaran Rp. 134.781.900
				<i>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	86,07% Alokasi Anggaran Rp. 1.025.149.900	84,54% Realisasi Anggaran Rp. 779.624.948
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	2 VUB Alokasi Anggaran Rp. 239.982.000	0 VUB Alokasi Anggaran Rp. 12.536.584
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	1 laporan Alokasi Anggaran Rp. 785.167.900	1 laporan Alokasi Anggaran Rp. 767.088.364
				<i>Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota</i>	96,5% Alokasi Anggaran Rp. 86.870.400	97,17% Realisasi Anggaran Rp. 58.153.600
				Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/ Kota Lain	750 ekor Alokasi Anggaran Rp. 86.870.400	440 ekor Realisasi Anggaran Rp. 58.153.600
6.				<b>Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>100%</b> <b>Alokasi Anggaran Rp. 1.969.037.000</b>	<b>100%</b> <b>Realisasi Anggaran Rp. 1.553.097.729</b>
				<i>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	85% Alokasi Anggaran Rp. 1.969.037.000	84,61% Realisasi Anggaran Rp. 1.553.097.729
				Pembanguna Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1 unit Alokasi Anggaran Rp. 103.560.000	1 unit Alokasi Anggaran Rp. 93.626.500

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	11 buah	9 buah
					Alokasi Anggaran Rp. 1.761.212.000	Alokasi Anggaran Rp. 1.365.914.729
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	1 unit	1 unit
					Alokasi Anggaran Rp. 100.140.000	Alokasi Anggaran Rp. 93.556.500
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1 unit	1 unit
					Alokasi Anggaran Rp. 4.125.000	Alokasi Anggaran Rp. 0
7.				<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>5,28%</b>	<b>30,86%</b>
					<b>Alokasi Anggaran Rp. 304.967.500</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 162.637.800</b>
				<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	5%	0,99%
					Alokasi Anggaran Rp. 22.678.000	Alokasi Anggaran Rp. 22.619.600
				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 laporan	1 laporan
					Alokasi Anggaran Rp. 22.678.000	Alokasi Anggaran Rp. 22.619.600
				<i>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	100%	100%
					Alokasi Anggaran Rp. 282.289.500	Alokasi Anggaran Rp. 140.018.200
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan	1 laporan
					Alokasi Anggaran Rp. 282.289.500	Alokasi Anggaran Rp. 140.018.200

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi
8.				<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>20,89%</b>	<b>21,85%</b>
					<b>Alokasi Anggaran Rp. 31,687,000</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 31,687,000</b>
				<i>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</i>	20,89%	20,75%
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 20.431.200</i>	<i>Alokasi Anggaran Rp. 19.566.000</i>
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 laporan	1 laporan
					Alokasi Anggaran Rp. 20.431.200	Alokasi Anggaran Rp. 19.566.000
9.				<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>22,72%</b>	<b>17,14%</b>
					<b>Alokasi Anggaran Rp. 225.067.600</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp. 200.775.800</b>
				<i>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	0,5	0,1
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 225.067.600</i>	<i>Alokasi Anggaran Rp. 200.775.800</i>
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	10 unit	10 unit
					Alokasi Anggaran Rp. 122.251.000	Alokasi Anggaran Rp. 104.835.000
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	10 unit	10 unit
					Alokasi Anggaran Rp. 85.865.600	Alokasi Anggaran Rp. 80.154.800
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 unit	6 unit
					Alokasi Anggaran Rp. 16.951.000	Alokasi Anggaran Rp. 15.786.000

Adapun program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Pagu anggaran Rp.55.223.500,- realisasi Rp.37.336.200,- atau 67,61%.

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk menggali dan meningkatkan penyediaan berbagai komoditas pangan sehingga terjadi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Adapun penjabaran program ini melalui kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan. Pagu anggaran Rp.16.716.000,- realisasi Rp.16.668.800,- atau 99,72%.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan. Pagu anggaran sebesar Rp.9.442.000,- dan realisasi Rp.9.428.400,- atau 99,86%. Kegiatan ini merupakan pemantauan harga komoditi unggulan pertanian yang berfluktuasi dari tingkat produsen, pengumpul besar dan tingkat eksportir. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan permintaan informasi harga pangan dan meningkatkan pengolahan informasi harga pasar dan laporan statistik pangan yang lebih akurat. Adapun penyediaan informasi harga pangan sedangkan untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan bertujuan untuk memberikan gambaran ketersediaan pangan untuk konsumsi pangan disuatu daerah. Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu tersusun 1 laporan dokumen Neraca Bahan Makanan.

- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.274.000,- dan realisasi Rp.7.240.400,- atau 99,54%. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan menggambarkan perkembangan ketersediaan, kebutuhan dan harga pasar untuk 11 komoditas strategis yang dengan jenis komoditi yaitu beras, jagung, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng gula pasir, cabe rawit, cabe keriting, bawang merah dan bawang putih. Pemantauan ketersediaan dan harga pasar dilakukan setiap minggu dan tersusun 1 laporan ketersediaan dan harga untuk 11 komoditi strategis.
- b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp. Rp.21.750.000,- dan realisasi Rp.4.500.000,- atau 20,69%.  
Sub kegiatan :
  - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.21.750.000,- dan realisasi Rp.4.500.000,- atau 20,69%. Kegiatan ini berupa pengadaan beras yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan, namun tidak terlaksana karena adanya kenaikan harga beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tidak diprediksi sebelum perubahan anggaran tahun 2023 sehingga harga satuan di DPA lebih rendah.
- c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi. Pagu anggaran Rp.16.757.000,- dan realisasi Rp.16.167.400,- atau 96,48%.  
Sub kegiatan :
  - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Local. Pagu anggaran sebesar Rp. 16.757.000,- dan realisasi Rp. 16.167.400,- atau 96,48%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui optimalisasi

pemanfaatan pekarangan sebagai upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Tujuan dari kegiatan ini yaitu disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat dan produktif. Data kelompok pemanfaatan optimalisasi pekarangan melalui kegiatan penanaman benih sayuran berupa kangkung, sawi dan terong yaitu (1) KWT Mawar Boneria Desa Barat Lambongan Kec. Bontomatene, (2) KWT Kamboja Desa Mekar Indah Kec. Buki, (3) KWT Fatmawati Desa Mare-mare Kec. Bontomanai, (4) KWT Berkah Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu, (5) KWT Anggrek I Desa Harapan Kec. Bontosikuyu.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan. Pagu anggaran Rp.7.635.000,- dan realisasi Rp.7.091.400,- atau 92,88%.

a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan. Pagu anggaran Rp. 7.635.000,- dan realisasi Rp.7.091.400,- atau 92,88%.

Sub kegiatan :

- Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dengan pagu anggaran Rp. 7.635.000,- dan realisasi Rp.7.091.400,- atau 92,88%. Hasil dari kegiatan ini adalah Peta komposit yang menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Dimana prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relative

lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah desa yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya pada wilayah prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dari 88 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 36 desa dari 88 desa (26,14%) yang terdiri dari 0 desa (0%) Prioritas 1; 10 desa (11,36%) Prioritas 2; dan 13 desa (14,77%) Prioritas 3. Desa prioritas 2 tersebar 1 desa di kecamatan Pasimarannu, 1 Desa di kecamatan Pasilambena, 1 desa di Kecamatan Pasimasunggu, 3 desa di Kecamatan Takabonerate, 1 desa di Kecamatan Pasimasunggu Timur, 1 desa di Kecamatan Bontosikuyu, 1 desa di Kecamatan Benteng dan 1 desa di Kecamatan Bontomatene. Desa prioritas 3 tersebar 3 desa di Kecamatan Pasimarannu, 2 desa di Kecamatan Pasilambena, 2 desa di Kecamatan Pasimasunggu, 3 desa di Kecamatan Takabonerate, dan 3 desa di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan. Pagu anggaran Rp.6.762.000,- dan realisasi Rp.222.000,- atau 3,28%.

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp.6.762.000,- dan realisasi Rp.222.000,- atau 3,28%.

Sub Kegiatan :

- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten Kota. Pagu anggaran Rp.6.762.000,- dan realisasi Rp.222.000,- atau 3,28%.

Adapun tujuannya yaitu sebagai upaya terpenuhinya pangan segar yang bebas dari kontaminasi oleh bahan mikrobiologis,

pestisida dan logam berat yang membahayakan kesehatan, melakukan pengujian pangan segar serta menyiapkan informasi tentang kondisi keamanan pangan segar di Kabupaten Kepulauan Selayar. Uji sampel pangan segar berupa sayuran tidak terlaksana karena pelaksana untuk uji sampel pangan segar belum tersedia pada e-katalog lokal Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar juga dilakukan melalui penyampaian-penyampaian kepada petani dan kelompok tani tentang bahaya penggunaan pestisida serta pelatihan-pelatihan pembuatan pestisida nabati pada Kelompok Wanita Tani (KWT).

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp.11.843.462.576,- dan realisasi Rp.11.679.645.351,- atau 98,62%.
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu anggaran Rp.20.100.000,- dan realisasi Rp.20.100.000,- atau 100%. Sub Kegiatan :
    - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Pagu anggaran Rp.11.879.000,- dan realisasi Rp.11.879.000,- atau 100%. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan pada lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam RKA/DPA SKPD. Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Perubahan Renstra 2021-2026, Renja Tahun 2024, Perubahan Renja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Rencana Aksi Tahun 2023, Dokumen Anggaran Tahun 2023.
    - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Pagu anggaran Rp.2.222.000,- dan realisasi Rp.2.222.000,- atau 100%. Kegiatan ini

merupakan pengukuran kinerja untuk memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023. Pengukuran kinerja ini digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu anggaran Rp.5.999.000,- dan realisasi Rp.5.999.000,- atau 100%. Kegiatan ini merupakan evaluasi kinerja untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian target masing-masing indikator yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023. Evaluasi kinerja ini digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya LKPJ, LPPD, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja atas Perjanjian Kinerja, serta Profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022 1 dokumen.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pagu anggaran Rp.10.310.618.676,- dan realisasi Rp.10.188.167.081,- atau 98,81%. Kegiatan ini merupakan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis untuk menyediakan keterangan dalam hal keuangan atau adanya ketersediaan dokumen pelaporan keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sub kegiatan :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Pagu anggaran Rp.10.301.820.676,- realisasi Rp.10.179.369.081,- atau 98,81%. Kegiatan ini meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 114 orang.
  - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Pagu anggaran Rp.3.636.000,- realisasi Rp.3.636.000,- atau 100%. Kegiatan ini meliputi pelayanan jasa administrasi keuangan yaitu verifikasi SPJ, pencatatan dan pengadministrasian serta pemeriksaan keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun hasil kegiatan ini yaitu adanya pelayanan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan.
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Pagu anggaran Rp.5.162.000,- realisasi Rp.5.162.000,- atau 100%. Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan/ anggaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya 1 dokumen laporan Akhir Keuangan (Neraca Keuangan)
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Pagu anggaran Rp.4.061.400,- realisasi Rp.4.061.400,- atau 100%.

Sub kegiatan :

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Pagu anggaran Rp.4.061.400,- realisasi Rp.4.061.400,- atau 100%. Kegiatan ini meliputi rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk tahun 2023. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1 laporan barang milik daerah.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Rp.20.493.600,- realisasi Rp.19.489.600,- atau 95,10%.

Sub Kegiatan :

- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai. Pagu anggaran Rp.10.151.600,- realisasi Rp.10.075.600,- atau 99,25%. Kegiatan ini meliputi monitoring dan evaluasi kehadiran pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta penilaian SKP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Pagu anggaran Rp.10.342.000,- realisasi Rp.9.414.000,- atau 91,03%. Sosialisasi yang dilaksanakan adalah sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak, yang dilaksanakan di Desa Barat Lambongan Kecamatan Bontomatene. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak yang menjadi isi dari Peraturan Daerah tersebut.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Rp.389.693.900,- realisasi Rp.385.622.900,- atau 98,96%.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Pagu anggaran Rp.30.413.900,- realisasi Rp.29.942.900,- atau 98,45%. Hasil kegiatan adalah tersedianya produk spanduk, jilid dan fotocopy selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Pagu anggaran Rp.9.280.000,- realisasi Rp.5.800.000,- atau 62,50%. Kegiatan berupa berlangganan Koran 3 (tiga) jenis.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Pagu anggaran Rp.350.000.000,- realisasi Rp.349.880.000,- atau

99,97%. Kegiatan berupa koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Kepulauan Selayar dalam upaya peningkatan pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai upaya penunjang pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pagu anggaran Rp.943.485.000,- realisasi Rp.923.574.248,- atau 97,89%.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Pagu anggaran Rp.85.678.000,- realisasi Rp.85.678.000,- atau 100%. Hasil kegiatan berupa pengadaan alat tulis kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Pagu anggaran Rp.94.960.000,- realisasi Rp.84.105.248,- atau 88,57%. Hasil kegiatan berupa layanan internet, air dan listrik untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pagu anggaran Rp.762.847.000,- realisasi Rp.753.791.000,- atau 98,81%. Hasil kegiatan berupa layanan makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, layanan jasa pengelolaan sampah, layanan jasa pegawai harian lepas serta layanan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pagu anggaran Rp.155.010.000,- realisasi Rp.138.630.122,- atau 89,43%.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan. Pagu anggaran Rp.41.630.000,- realisasi Rp.41.543.522,- atau 99,79%. Hasil dari kegiatan ini yaitu terpeliharanya kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan mobil tipe VII sebanyak 1 unit.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas/Lapangan. Pagu anggaran Rp.103.310.000,- realisasi Rp.88.550.600,- atau 85,71%. Hasil dari kegiatan ini yaitu terpeliharanya kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan dinas dengan rincian untuk motor tipe I sebanyak 54 unit, motor tipe III sebanyak 15 unit, dan mobil tipe IV sebanyak 1 unit.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu anggaran Rp.10.070.000,- realisasi Rp.8.536.000,- atau 100%. Kegiatan ini meliputi pemeliharaan AC, laptop dan printer.

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Pagu anggaran Rp.1.956.515.800,- realisasi Rp.1.280.829.448,- atau 65,46%.

a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. Pagu anggaran Rp.844.495.500,- realisasi Rp.443.050.900,- atau 52,46%.

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi. Pagu anggaran Rp.385.214.000,- realisasi Rp.308.269.000,- atau 80,03%. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) oleh 4 (empat) Kelompok Wanita Tani (KWT) yaitu : (1). KWT Kamboja Desa Bontotangga Kec. Bontoharu, (2) KWT Anggrek Desa Laiyolo Baru Kec. Bontosikuyu, (3) KWT

Bunga Seroja Kel. Putabangun Kec. Bontoharu, (4) KWT Melati Kel. Batangmata Kec. Bontomatene. Kegiatan ini juga mencakup pengawasan penggunaan sarana pasca panen serta penyusunan harga pasar komoditi pertanian. Hasil dari kegiatan adalah laporan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan laporan harga pasar komoditi pertanian tahun 2023.

Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) KWT Cahaya Ujung Desa Ujung Kec. Pasimasunggu Timur yang tidak terealisasi pada pelaksanaan P2L karena pengaruh dampak *elnino* yang menyebabkan kurangnya sumber air pada wilayah tersebut.

- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. Pagu anggaran Rp.459.281.500,- realisasi Rp.134.781.900,- atau 29,35%. Terdapat anggaran pengadaan handtraktor sebanyak 6 unit, mesin pemotong rumput 2 unit, herbisida 176 botol, tungku pengasapan kopra 1 unit yang diluncurkan ke tahun anggaran 2024. Adapun Kegiatan ini berupa pengadaan sarana pertanian meliputi :

1. Kawat Duri

Pengadaan kawat duri sebanyak 282 roll dengan penerima manfaat yaitu :

- o Poktan Pertanian Bina Mandiri Kelu. Bontobangun Kec. Bontoharu sebanyak 141 roll.
- o Poktan Dara Indra Permai Desa Harapan Kec. Bontosikuyu sebanyak 141 roll.

2. Pestisida Roundup

Pengadaan pestisida Roundup sebanyak 1.234 liter dengan penerima manfaat sebagai berikut :

- o Poktan Suka Maju Desa Kembang Ragi Kec. Pasimasunggu sebanyak 176 liter.
- o Poktan Sejahtera Desa Bontosaile Kec. Pasimasunggu sebanyak 176 liter.

- Poktan Bontomalling Desa Bontomalling Kec. Pasimasunggu Timur sebanyak 177 liter.
- Poktan Bonto Harapan Desa Bontobaru Kec. Pasimasunggu Timur sebanyak 177 liter.
- Poktan Baji Minasa Desa Batang Kec. Takabonarate sebanyak 352 liter.

### 3. Bak Fiber

Pengadaan Bak Fiber sebanyak 4 buah dengan penerima manfaat Poktan A'rera Kel. Benteng Utara Kec. Benteng.

- b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp.1.025.149.900,- realisasi Rp.779.624.948,- atau 76,05%.

Sub Kegiatan :

- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman. Pagu anggaran Rp.239.982.000,- realisasi Rp.12.536.584,- atau 5,22%. Terdapat anggaran pengadaan benih padi Inbrida sebanyak 1.400 Kg dan pengadaan jeruk keprok selayer sebanyak 3.333 pohon yang diluncurkan ke tahun anggaran 2024.
- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman. Pagu anggaran Rp.785.167.900,- realisasi Rp.767.088.364,- atau 97,70%. Kegiatan berupa intensifikasi dengan pengadaan sarana produksi pertanian berupa bibit tanaman hortikultura dan perkebunan sebanyak 23.973 pohon dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Pengadaan Bibit Pala

Pengadaan bibit pala sebanyak 8.823 pohon dengan penerima manfaat yaitu

- Poktan Baji Pamai Desa Bontokoraang Kec. Bontomanai 2.000 pohon

- Poktan Bina Karya Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai 2.000 pohon
- Poktan Harapan Baru Desa Bonea Timur Kec. Bontomanai 2.000 pohon
- Poktan Nirannuang III Desa Bonea Timur Kec. Bontomanai 1.775 pohon
- Poktan Bina Usaha Desa Lalang Bata Kec. Buki 823 pohon
- Poktan Usaha Baru Desa Kohala Kec. Buki 225 pohon.

## 2. Pengadaan Bibit Sukun

Pengadaan bibit sukun sebanyak 6.400 pohon dengan penerima manfaat yaitu

- Poktan Nekara Jaya Kel. Benteng Kec. Benteng 500 pohon
- Poktan Cemerlang Desa Kalepadang Kec. Bontoharu 300 pohon
- Poktan Tana Toa Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai 500 pohon
- Gapoktan Anugerah Mandiri Desa Kohala Kec. Buki 800 pohon
- KWT Kamboja Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 500 pohon
- KWT Mawar Desa Binanga Sombaiya Kec. Bontosikuyu 500 pohon
- KWT Sipainga' Kel. Benteng Utara Kec. Benteng 100 pohon
- KWT Teratai Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 500 pohon
- KWT Juluatia Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 500 pohon
- Poktan Subur Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 500 pohon

- Poktan Tamalanrea Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu  
700 pohon
- Poktan Tunas Baru Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu  
500 pohon
- Poktan Tunas Jaya Desa Buki Kec. Buki 500 pohon.

### 3. Pengadaan Bibit Alpukat

Pengadaan bibit alpukat sebanyak 2.350 pohon dengan penerima manfaat yaitu

- Gapoktan Sipaingak Desa Tamalanrea Kec. Bontomatene  
360 pohon
- Gapoktan Tuna Bontotangnga Desa Bontotangnga Kec.  
Bontoharu 300 pohon
- Poktan Nirannuang III Desa Bontokoraang Kec.  
Bontomanai 300 pohon
- Poktan Sipakatau Desa Bontokoraang Kec. Bontomanai  
300 pohon
- Poktan Sumber Makmur Desa Onto Kec. Bontomatene  
440 pohon
- Poktan Tunas Baru Desa Onto Kec. Bontomatene 400  
pohon
- Poktan Tunas Muda Desa Kohala Kec. Buki 200 pohon

### 4. Pengadaan Bibit Mangga

Pengadaan bibit mangga sebanyak 6.400 pohon dengan penerima manfaat yaitu

- Poktan A'rera Kel. Benteng Utara Kec. Benteng 600 pohon
- Poktan Pamaling Jaya Desa Lowa Kec. Bontosikuyu 1.250  
pohon
- Poktan Sinar Lowa Desa Lowa Kec. Bontosikuyu 1.250  
pohon
- Poktan Tunas Baru Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu  
250 pohon

- KWT Teratai Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 250 pohon
  - Poktan Alam Indah Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu 600 pohon
  - Poktan Harapan jaya Desa Kahu-kahu Kec. Bontoharu 600 pohon
  - Poktan Juluatia Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 250 pohon
  - KWT Kamboja Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 250 pohon
  - Poktan Lamberea II Kel. Benteng kec. Benteng 600 pohon
  - Poktan Minasa Upa Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 250 pohon
  - Poktan Subur Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 250 pohon.
- c. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain. Pagu anggaran Rp.86.870.400,- realisasi Rp.58.153.600,- atau 66,94%.

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain. Pagu anggaran Rp.86.870.400,- realisasi Rp.58.153.600,- atau 66,94%. Terdapat anggaran pengadaan ayam broiler sebanyak 310 ekor dan pengadaan pakan ayam sebanyak 1.400 Kg yang diluncurkan ke tahun anggaran 2024. Kegiatan ini berupa :
  - o Pengadaan bibit ayam petelur/pullet sebanyak 440 ekor dengan penerima manfaat KWT Matahari Lingkungan Tabang Kel. Putabangun kec. Bontoharu.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Pagu anggaran Rp.1.969.037.000,- realisasi Rp.1.553.097.729,- atau 78,88%.

a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian. Pagu anggaran Rp.1.969.037.000,- realisasi Rp.1.553.097.729,- atau 78,88%.

Sub Kegiatan :

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani. Pagu anggaran Rp.103.560.000,- realisasi Rp.93.626.500,- atau 90,41%. Anggaran yang tidak realisasi adalah anggaran untuk kegiatan Retensi.

o Pembangunan jaringan irigasi Dusun Binanganipa Desa Bontosaile Kec. Pasimasunggu 1 unit.

b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani. Pagu anggaran Rp.1.761.212.000,- realisasi Rp.1.365.914.729,- atau 77,56%. Jalan tani sebagai prasarana kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi dan hasil produk pertanian. Dimensi lebar badan jalan usahatani minimal dapat dilalui kendaraan dan dapat saling berpapasan. Jalan usahatani sebanyak 11 ruas, terdapat 2 ruas jalan usahatani dan anggaran retensi yang diluncurkan ke tahun anggaran 2024.

o Pembangunan Jalan Tani ruas Baholle – Tompi Dusun Tajuiya Desa Bungaiya Kec. Bontomatene

o Pembangunan Jalan Tani Barae Lanjutan Desa Ujung Kec. Pasimasunggu Timur

o Pembangunan Jalan Tani Parang Kadieng Dusun Kampung Tangnga Desa Teluk Kampe Kec. Pasimasunggu

o Pembangunan Jalan Tani Dusun Bontoala Desa Harapan Kec. Bontosikuyu

o Pembangunan Jalan Usaha Tani Huluk Dusun Bontoala Desa Harapan kec. Bontosikuyu

- Pembangunan Jalan Usaha Tani Hulu Desa Harapan Kec. Bontosikuyu
  - Pembangunan Jalan Tani Tabarro Desa Laiyolo Baru kec. Bontosikuyu
  - Pembangunan Jalan Tani ruas Matahaka Desa Mare-mare Kec. Bontomanai
  - Pembangunan Jalan Tani ruas Rajeng – Dodak Desa Polebunging Kec. Bontomanai.
  - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit. Pagu anggaran Rp.100.140.000,- realisasi Rp.93.556.500,- atau 93,43%. Kegiatan ini berupa rehabilitasi DAM Parit Poktan Selendang Mayang Dusun Lajongko Desa Kembang Ragi Kec. Pasimasunggu 1 unit. Anggaran yang tidak realisasi adalah anggaran untuk kegiatan Retensi yang diluncurkan ke tahun anggaran 2024.
  - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya. Pagu anggaran Rp.4.125.000,- realisasi Rp. 0,- atau 0%. Kegiatan berupa retensi pembangunan pos jaga yang tercatat sebagai hutang belanja pada neraca keuangan dan kembali diluncurkan ke tahun anggaran 2024.
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pagu anggaran Rp.304.967.500,- realisasi Rp.162.637.800,- atau 53,33%.
- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp.22.678.000,- realisasi Rp.22.619.600,- atau 99,74%.
- Sub Kegiatan :
- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis. Pagu anggaran Rp.22.678.000,- realisasi Rp.22.619.600,- atau 99,74%. Kegiatan ini berupa Pelayanan

Terpadu Kesehatan Hewan dengan tujuan meningkatkan layanan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan menular dalam pengendalian dan penggulungan penyakit hewan menular di Kabupaten Kepulauan Selayar.

- b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp.282.289.500,- realisasi Rp.140.018.200,- atau 49,60%.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Pagu anggaran Rp.282.289.500,- realisasi Rp.140.018.200,- atau 49,60%. Kegiatan ini dilakukan untuk menyediakan obat-obatan ternak, vaksin, peralatan kesehatan hewan. Terdapat anggaran pengadaan obat ternak yang diluncurkan ke tahun anggaran 2024 karena dalam proses pengadaan barang dan jasa terkendala pada TKDN obat ternak tersebut yang tidak memenuhi aturan minimal TKDN 40%.

8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Pagu anggaran Rp.20.431.200,- realisasi Rp.19.566.000,- atau 95,77%.

- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota. Pagu anggaran Rp.20.431.200,- realisasi Rp.19.566.000,- atau 95,77%.

Sub Kegiatan :

- Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Pagu anggaran Rp.20.431.200,- realisasi Rp.19.566.000,- atau 95,77%. Pengendalian OPT ini adalah tindakan untuk mencegah kerugian pada tanaman budidaya yang diakibatkan oleh OPT baik hama, gulma, serangga pengganggu sehingga dapat menghindari kerugian ekonomi berupa kehilangan hasil panen serta penurunan kualitas/mutu produk panen. Kegiatan ini dilakukan pula sosialisasi dan implementasi penanganan hama

kutu perisai (*Aspidiotus destructor*) pada tanaman kelapa di Desa Buki Timur Kec. Buki, Desa Bonea Makmur, Baturapak Desa Polebunging, Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai, dan Kel. Batangmata Sapo Kec. Bontomatene.

9. Program Penyuluhan Pertanian. Pagu anggaran Rp.225.067.600,- realisasi Rp.200.775.800,- atau 89,21%. Tujuan penyuluhan pertanian adalah dalam rangka menghasilkan SDM pelaku pembangunan pertanian yang kompeten sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik, berusaha tani lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera dan lingkungan lebih sehat.

Adapun kegiatan dari program ini yaitu :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Pagu anggaran Rp.225.067.600,- realisasi Rp.200.775.800,- atau 89,21%. Terdapat beberapa rencana kegiatan yang sedianya akan dilaksanakan pada BPP wilayah kepulauan, namun terkendala pada kondisi lapangan sebagai dampak *el nino*.

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa. Pagu anggaran Rp.122.251.000,- realisasi Rp.104.835.000,- atau 85,75%. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memfasilitasi terlaksananya kegiatan penyuluhan di BPP diantaranya pelaksanaan kostratani di 10 BPP. Adapun 10 BPP yang terfasilitasi yaitu BPP Bontosikuyu, BPP Bontoharu/Benteng, BPP Bontomanai, BPP Buki, BPP Bontomatene, BPP Pasimasunggu, BPP Pasimasunggu Timur, BPP Pasimarannu, BPP Takabonerate dan BPP Pasilambena. Selain itu, dilakukan pula pelatihan tematik dan sosialisasi geospasial pada setiap

BPP yang sumber dananya adalah DAK Non Fisik. Rekapitulasi data pembangunan pertanian tingkat kecamatan meliputi komoditas strategis pertanian dan kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian.

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Pagu anggaran Rp.85.865.600,- realisasi Rp.80.154.800,- atau 93,35%. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memfasilitasi terlaksananya kegiatan kelembagaan petani diantaranya pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) yang dilaksanakan Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian. Pagu anggaran Rp.16.951.000,- realisasi Rp.15.786.000,- atau 93,13%. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan demplot di 5 (lima) BPP yaitu BPP Benteng/Bontoharu, BPP Bontosikuyu, BPP Bontomanai, BPP Buki dan BPP Bontomatene. Disamping itu bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan rutin admin Simluhtan dan Konstratani.

### **C. Realisasi Keuangan**

Analisis capaian keuangan dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas LRA, NERACA, dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta diterapkannya sistem dan prosedur akuntansi secara berkesinambungan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 15.749.521.735,- (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian :

- Belanja Operasi, Rp. 14.427.332.735,- (empat belas milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)
- Belanja Modal, Rp. 1.322.189.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD, anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Selayar menjadi Rp.16.389.102.176,- (enam belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dengan rincian :

- Belanja Operasi, Rp.14.814.665.176,- (empat belas milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)
- Belanja Modal, Rp. 1.574.437.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Perubahan anggaran ini dilakukan dengan pertimbangan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023 agar berdayaguna dan berhasilguna.

Pagu anggaran perubahan tahun 2023 sebesar Rp.16.389.102.176,- (enam belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan realisasi sebesar Rp.14.941.201.728,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 91,17%. Sisa anggaran sebesar Rp.1.447.900.448,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Tabel 19. Realisasi Capaian Keuangan TA. 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
<b>Pendapatan Daerah</b>		<b>50.000.000,-</b>	<b>39.067.500,-</b>	<b>78,14</b>
1.	Pendapatan	50.000.000,-	39.067.500,-	78,14
<b>Belanja Daerah</b>		<b>16.389.102.176,-</b>	<b>14.941.201.728,-</b>	<b>91,17</b>
1.	Belanja Operasi	14.814.665.176,-	13.748.800.999,-	92,81
2.	Belanja Modal	1.574.437.000,-	1.192.400.729,-	75,74

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Pagu Anggaran Pokok dan Anggaran Perubahan serta Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
1.	Pangan	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>Rp. 48.437.500</b>	<b>Rp. 55.223.500</b>	<b>Rp. 37.336.300</b>	<b>67,61</b>
		<i>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Rp. 12.430.000</i>	<i>Rp. 16.716.000</i>	<i>Rp. 16.668.800</i>	<i>99,72</i>
		1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Rp. 6.208.000	Rp. 9.442.000	Rp. 9.428.400	99,86
		2. Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 6.222.000	Rp. 7.274.000	Rp. 7.240.400	99,54
		<i>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Rp. 19.250.000</i>	<i>Rp. 21.750.000</i>	<i>Rp. 4.500.000</i>	<i>20,69</i>
		1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp. 19.250.000	Rp. 21.750.000	Rp. 4.500.000	20,69
		<i>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>Rp. 16.757.000</i>	<i>Rp. 16.757.500</i>	<i>Rp. 16.167.400</i>	<i>96,48</i>
		1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp. 16.757.000	Rp. 16.757.500	Rp. 16.167.400	96,48
.2.		<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>Rp. 6.415.000</b>	<b>Rp. 7.635.000</b>	<b>Rp. 7.091.400</b>	<b>92,88</b>
		<i>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<i>Rp. 6.415.000</i>	<i>Rp. 7.635.000</i>	<i>Rp. 7.091.400</i>	<i>92,88</i>
		1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp. 6.415.000	Rp. 7.635.000	Rp. 7.091.400	92,88
3.		<b>Program Pengawasan Pangan Segar</b>	<b>Rp. 7.332.000</b>	<b>Rp. 6.762.000</b>	<b>Rp. 222.000</b>	<b>3,28</b>

No	Urusan Pemerintahan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
		<i>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kabupaten/ Kota</i>	<i>Rp. 7.332.000</i>	<i>Rp. 6.762.000</i>	<i>Rp. 222.000</i>	<i>3,28</i>
		1. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan kabupaten/ kota	Rp. 7.332.000	Rp. 6.762.000	Rp. 222.000	3,28
4.	Pertanian	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rp. 11.167.639.235</b>	<b>Rp. 11.843.462.576</b>	<b>Rp. 11.679.645.351</b>	<b>98,62</b>
		<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 28.202.000</i>	<i>Rp. 20.100.000</i>	<i>Rp. 20.100.000</i>	<i>100</i>
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 19.451.000	Rp. 11.879.000	Rp. 11.879.000	100
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 4.502.000	Rp. 2.222.000	Rp. 2.222.000	100
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.249.000	Rp. 5.999.000	Rp. 5.999.000	100
		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 9.825.360.235</i>	<i>Rp. 10.310.618.676</i>	<i>Rp. 10.188.167.081</i>	<i>98,81</i>
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 9.806.832.235	Rp. 10.301.820.676	Rp. 10.179.369.081	98,81
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 7.016.000	Rp. 3.636.000	Rp. 3.636.000	100
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 11.512.000	Rp. 5.162.000	Rp. 5.162.000	100
		<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 4.061.400</i>	<i>Rp. 4.061.400</i>	<i>Rp. 4.061.400</i>	<i>100</i>
		1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 4.061.400	Rp. 4.061.400	Rp. 4.061.400	100
		<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 23.910.000</i>	<i>Rp. 20.493.600</i>	<i>Rp. 19.489.600</i>	<i>95,10</i>
		1. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 2.848.000	Rp. 10.151.600	Rp. 10.075.600	99,25
		2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 21.062.000	Rp. 10.342.000	Rp. 9.414.000	91,03

No	Urusan Pemerintahan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
		<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Rp. 232.009.000</i>	<i>Rp. 389.693.900</i>	<i>Rp. 385.622.900</i>	98,96
		1. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp. 22.700.000	Rp. 30.413.900	Rp. 29.942.900	98,45
		2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 9.280.000	Rp. 9.280.000	Rp. 5.800.000	62,50
		3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 200.029.000	Rp. 350.000.000	Rp. 349.880.000	99,97
		<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Rp. 19.844.000</i>	<i>Rp. 0</i>	<i>Rp. 0</i>	0
		1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 19.844.000	Rp. 0	Rp. 0	0
		<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Rp. 912.872.600</i>	<i>Rp. 943.485.000</i>	<i>Rp. 923.574.248</i>	97,89
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 85.678.000	Rp. 85.678.000	Rp. 85.678.000	100
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 110.665.000	Rp. 94.960.000	Rp. 84.105.248	88,57
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 716.529.600	Rp. 762.847.000	Rp. 753.791.000	98,81
		<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Rp. 121.380.000</i>	<i>Rp. 155.010.000</i>	<i>Rp. 138.630.122</i>	89,43
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 41.630.000	Rp. 41.630.000	Rp. 41.543.522	99,79
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 69.680.000	Rp. 103.310.000	Rp. 88.550.600	85,71
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 10.070.000	Rp. 10.070.000	Rp. 8.536.000	84,77
5,		<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Rp. 2.295.670.500</b>	<b>Rp. 1.956.515.800</b>	<b>Rp. 1.280.829.448</b>	<b>65,46</b>
		<i>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>Rp. 995.874.400</i>	<i>Rp. 844.495.500</i>	<i>Rp. 443.050.900</i>	52,46

No	Urusan Pemerintahan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
		1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp. 379.874.000	Rp. 385.214.000	Rp. 308.269.000	80,03
		2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp. 616.000.400	Rp. 459.281.500	Rp. 134.781.900	29,35
		<i>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Rp. 1.247.014.100</i>	<i>Rp. 1.025.149.900</i>	<i>Rp. 779.624.948</i>	<i>76,05</i>
		1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Rp. 144.592.000	Rp. 239.982.000	Rp. 12.536.584	5,22
		2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Rp. 1.102.422.100	Rp. 785.167.900	Rp. 767.088.364	97,70
		<i>Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Rp. 52.782.000</i>	<i>Rp. 86.870.400</i>	<i>Rp. 58.153.600</i>	<i>66,94</i>
		1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/ Kota Lain	Rp. 52.782.000	Rp. 86.870.400	Rp. 58.153.600	66,94
6.		<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Rp. 1.658.115.000</b>	<b>Rp. 1.969.037.000</b>	<b>Rp. 1.553.097.729</b>	<b>78,88</b>
		<i>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	<i>Rp. 1.658.115.000</i>	<i>Rp. 1.969.037.000</i>	<i>Rp. 1.553.097.729</i>	<i>78,88</i>
		1. Pembanguna Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rp. 102.520.000	Rp. 103.560.000	Rp. 93.626.500	90,41
		2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp. 1.452.370.000	Rp. 1.761.212.000	Rp. 1.365.914.729	77,56
		3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Rp. 99.100.000	Rp. 100.140.000	Rp. 93.556.500	93,43

No	Urusan Pemerintahan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
		4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rp. 4.125.000	Rp. 4.125.000	Rp. 0	0
7.		<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>R. 311.524.000</b>	<b>Rp. 304.967.500</b>	<b>Rp. 162.637.800</b>	<b>53,33</b>
		<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Rp. 22.678.000</i>	<i>Rp. 22.678.000</i>	<i>Rp. 22.619.600</i>	<i>99,74</i>
		1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Rp. 22.678.000	Rp. 22.678.000	Rp. 22.619.600	99,74
		<i>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Rp. 288.846.000</i>	<i>Rp. 282.289.500</i>	<i>Rp. 140.018.200</i>	<i>49,60</i>
		1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp. 288.846.000	Rp. 282.289.500	Rp. 140.018.200	49,60
8.		<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Rp. 20.418.500</b>	<b>Rp. 20.431.200</b>	<b>Rp. 19.566.000</b>	<b>95,77</b>
		<i>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</i>	<i>Rp. 20.418.500</i>	<i>Rp. 20.431.200</i>	<i>Rp. 19.566.000</i>	<i>95,77</i>
		1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp. 20.418.500	Rp. 20.431.200	Rp. 19.566.000	95,77
9.		<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Rp. 233.970.000</b>	<b>Rp. 225.067.600</b>	<b>Rp. 200.775.800</b>	<b>89,21</b>
		<i>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Rp. 233.970.000</i>	<i>Rp. 225.067.600</i>	<i>Rp. 200.775.800</i>	<i>89,21</i>
		1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa \	Rp. 122.251.000	Rp. 122.251.000	Rp. 104.835.000	85,75
		2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp. 94.768.000	Rp. 85.865.600	Rp. 80.154.800	93,35

No	Urusan Pemerintahan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
		3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp. 16.951.000	Rp. 16.951.000	Rp. 15.786.000	93,13
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 15.749.521.735</b>	<b>Rp. 16.389.102.176</b>	<b>Rp. 14.941.201.728</b>	<b>91,17</b>

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan sebanyak 3 (dua) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.16.389.102.176,- (enam belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan realisasi sebesar Rp.14.941.201.728,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 91,17%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp.1.447.900.448,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 16 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan Kabupaten  
Kepulauan Selayar,



**ANDI KRISNAYANTI, S.Sos.**

Pangkat : Pembina, IV/A

NIP. 196809181993032005